

anri

Arsip Nasional Republik Indonesia

EDISI 65/JANUARI-APRIL/2015

ARSIP

Media Kearsipan Nasional

ERA BARU DUNIA KEARSIPAN INDONESIA



Konferensi

ASIA-AFRIKA

7 Reel Arsip Film

1778 Lembar Arsip Kertas

565 Lembar Arsip Foto



Mari Dukung
Arsip Konferensi Asia Afrika
sebagai *Memory of the World*

Video KAA dapat disaksikan di www.anri.go.id atau



@ArsipNasionalRI

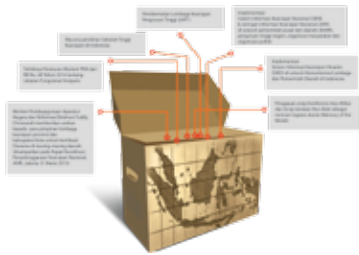


Arsip Nasional Republik Indonesia



Humas Arsip Nasional RI

DAFTAR ISI



5 MENYONGSONG ERA BARU DUNIA KEARSIPAN DI INDONESIA

Dunia kearsipan sebagai salah satu bidang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak luput dari perubahan. Arsip yang berada di beberapa tempat pada awalnya secara umum hanya dimaknai sebagai tumpukan kertas kegiatan yang sudah tidak digunakan lagi dimana biasanya disimpan di dalam kardus atau karung bekas, saat ini besar tuntutan akan perubahan dari kondisi tersebut.

DARI REDAKSI _____ **4**

Banu Prabowo : _____ **17**

NAWA CITA DAN ARSIP : MENGGALI KETELADANAN MELALUI ARSIP, MENUJU RENAISSANS INDONESIA

Sumantri : _____ **19**

TAHUN 1965, INDONESIA MAMPU MENEMBUS ANGKASA LUAR

Ina Mirawati : _____ **22**

MELALUI ARSIP TERCIPTA BERAGAM KREATIFITAS SESUAI PROGRAM NAWA CITA

Mochammad Satrianto : _____ **26**

PEMBANGUNAN TERPADU MASA HINDIA-BELANDA MELALUI KHAZANAH ARSIP BOW DAN V EN W

Rina Rakhmawati : _____ **29**

TANTANGAN TEKNOLOGI MEDIA SOSIAL DALAM DUNIA KEARSIPAN



12 Rayi Darmagara : DANA DESA DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAANNYA

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa yang keberadaannya pada masa dahulu terlupakan dan tidak diperhatikan, saat ini menjadi prioritas utama dalam pembangunan.

Parno Nusantara : _____ **33**

DIGITALISASI & METADATA ARSIP DAGREGISTER OLEH CORTS FOUNDATION DI ANRI

Dharwis W.U. Yacob : _____ **38**

SELAMAT DATANG PERMENPAN BARU! TANTANGAN DAN IMPLEMENTASI

Manca Negara : _____ **40**

PERINGATAN 100 TAHUN PERANG DUNIA I: ARSIP NEGARA TURKI BERHASIL AKUISISI ARSIP PD I DI DUNIA

Profil : _____ **43**

BALE PANYAWANGAN DIORAMA PURWAKARTA: IKONNYA KAD PURWAKARTA

Octavia Syafarwati : _____ **45**

MENGENAL ARSIP KARTOGRAFI LEBIH DEKAT

LIPUTAN _____ **47**



15 Sumrahyadi : KABINET BARU PROGRAM BARU DAN HARAPAN BARU

Setelah memasuki lebih dari 100 hari Kabinet Kerja pimpinan Presiden terpilih Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan visi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, telah memunculkan program kerja baru dengan beberapa skala prioritas. Prioritas tersebut tertuang ke dalam 9 (sembilan) agenda yang dikenal dengan istilah Nawa Cita.



KETERANGAN COVER

Visualisasi mengenai perkembangan dunia kearsipan di Indonesia meliputi: E-Arsip, Pengajuan Arsip KAA dan GNB sebagai *Memori of the World*, terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis

Visualizer: isanto

Pembina:

Kepala Arsip Nasional RI,
Sekretaris Utama Arsip Nasional RI,
Deputi Bidang Konservasi Arsip,
Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan,
Deputi Bidang Informasi &
Pengembangan Sistem Kearsipan

Penanggung Jawab:

Dra. Multi Siswati, MM

Pemimpin Redaksi:

Eli Ruliawati, S.Sos., MAP

Wakil Pemimpin Redaksi:

Adhie Gesit Pambudi, S.Sos., MA.,

Dewan Redaksi:

Drs. Azmi, M.Si., Drs. Hilman Rosmana,

M. Ihwan, S.Sos., M.Si.,

Drs. Bambang Parjono Widodo, M.Si.,

Drs. Langgeng Sulistyio B,

Redaktur Pelaksana:

Bambang Barlian, S.AP.,

Susanti, S.Sos., M.Hum.,

Editor:

Tiara Kharisma, S.I.Kom.,

Rayi Darmagara, SH.,

R. Suryagung Sudiby P., S.S., M.Hum.,

Achmad Dedi Faozi, S.Hum.,

Raistiwar Pratama, S.S

Fotografer:

Hanif Aulia Rahman, A.Md.,

Farida Aryani, S.Sos

Desain Grafis:

Beny Oktavianto, A.Md

Isanto, A.Md

Sekretariat:

Khoerun Nisa Fadillah, S.IP.,

Yuanita Utami, S.IP.,

Octavia Syafarwati, S.Si.,

.....
Majalah ARSIP menerima artikel dan berita tentang kegiatan kearsipan dan cerita-cerita menarik yang merupakan pengalaman pribadi atau orang lain. Jumlah halaman paling banyak tiga halaman atau tidak lebih dari 500 kata. Redaksi berhak menyunting tulisan tersebut, tanpa mengurangi maksud isinya. Artikel sebaiknya dikirim dalam bentuk *hard* dan *soft copy* ke alamat Redaksi: Subbag. Publikasi dan Dokumentasi, Bagian Humas, Arsip Nasional RI, Jalan Ampera Raya No. 7 Cilandak, Jakarta 12560, Telp.: 021-780 5851 Ext. 404, 261, 111, Fax.: 021-781 0280, website: www.anri.go.id, email: info@anri.go.id

Kearsipan di Indonesia sudah berkiprah jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, ketika fungsi arsip masih sebatas sebagai bagian dari kegiatan administrasi dan digunakan untuk kepentingan pencipta arsip. Bidang kearsipan semakin dianggap strategis sejak arsip tidak lagi hanya digunakan untuk kepentingan internal penciptanya akan tetapi juga informasinya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih luas.

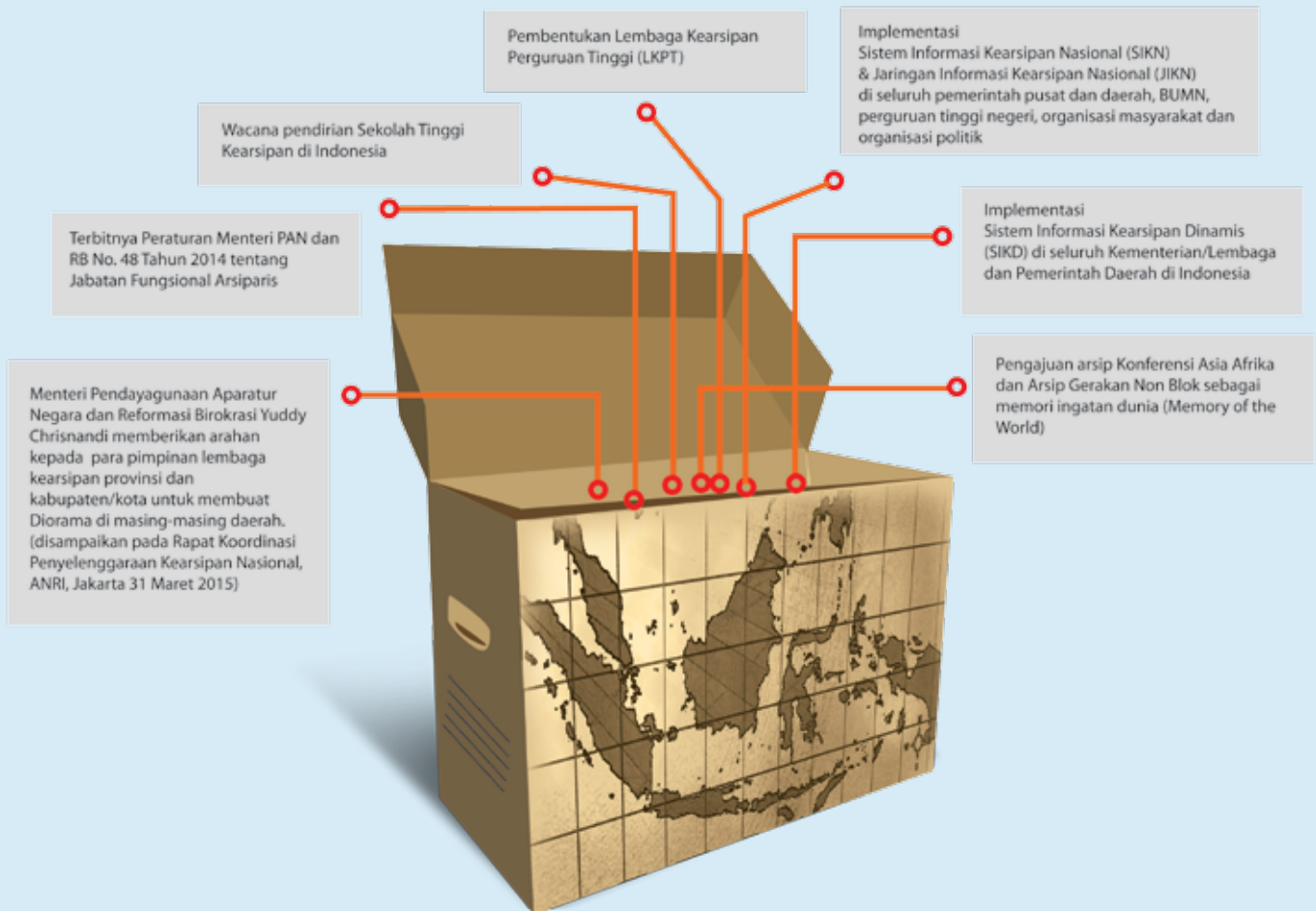
Penyelarasan terus dilakukan untuk dapat menyesuaikan dengan tuntutan zaman sebagai konsekuensi dari kemajuan iptek, khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang juga berimplikasi pada pergeseran pada tatanan komunikasi, baik lokal, regional, nasional maupun global.

Dalam menyongsong era baru dunia kearsipan di Indonesia, Majalah ARSIP edisi ke 65 menurunkan berbagai artikel yang dapat memberikan pemahaman lebih luas mengenai peran kearsipan dalam mendukung program pembangunan di berbagai bidang terkait, termasuk artikel laporan utama yang antara lain berisi wawancara dengan Kepala ANRI, Menteri PAN-RB, dan Rektor UNPAD periode 2007-2015, di samping artikel lainnya yang menjadi rubrik tetap.

Diharapkan dengan terbitnya Majalah ARSIP edisi kali ini dapat memberikan manfaat bagi para peminat, pemerhati, termasuk para pemangku kepentingan. Di lain pihak, kritik dan saran dari pembaca sangat kami harapkan untuk keperluan perbaikan majalah ini di masa yang akan datang.

Redaksi

MENYONGSONG ERA BARU DUNIA KEARSIPAN DI INDONESIA



Dunia kearsipan sebagai salah satu bidang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak luput dari perubahan. Arsip yang berada di beberapa tempat pada awalnya secara umum hanya dimaknai sebagai tumpukan kertas hasil kegiatan yang sudah tidak digunakan lagi di mana biasanya disimpan di dalam kardus atau karung bekas, saat ini besar tuntutan akan perubahan dari kondisi tersebut. Bahkan arsip sudah menjelma dalam berbagai bentuk media simpan termasuk arsip elektronik. Besar tuntutan bahwa arsip dapat disajikan kembali bagi publik

baik untuk keperluan penelitian dalam rangka penyelesaian studi maupun untuk melihat kembali terobosan serta kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu. Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu peraturan yang mendasari hal tersebut.

Transformasi dalam bidang kearsipan mengikuti perkembangan yang terjadi di berbagai bidang kehidupan. Pimpinan tertinggi pemerintahan menjadi faktor besar dalam transformasi sektor-sektor kehidupan dalam suatu negara. Dalam era kepemimpinan Presiden Jokowi kita kenal adanya 9 (Sembilan)

agenda prioritas atau biasa disebut Nawacita. Hal ini tentu menjadi salah satu dasar yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam membuat program kerja dan perubahan dalam tubuh instansi pemerintah. Ketika terjadi perubahan dalam sebuah instansi pemerintah, tentu hal ini menjadi sebuah era baru dalam bidang pemerintahan, demikian pula halnya dengan bidang kearsipan. Menurut Menteri PAN dan RB, Yuddy Chrisnandi, "Aparatur negara yang salah satu tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, secara umum dituntut untuk bisa merespon perkembangan strategis yang cepat."

Artinya seorang aparatur negara harus dapat menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan lingkungan strategisnya.

Dunia kearsipan di Indonesia yang pada prakteknya telah ada sejak tahun 1892 telah mengalami begitu banyak perubahan. Melihat sejarah, pada masa kependudukan Belanda di Nusantara, lembaga kearsipan dikenal dengan nama *Landsarchief*. Pada masa itu segala kebijakan pemerintahan disesuaikan dan diambil oleh Gubernur Jenderal yang didampingi oleh *Algemeene Secretarie*, demikian pula halnya dengan penataan arsip saat itu disesuaikan dengan kebutuhan pimpinan pemerintahan. Memasuki era kemerdekaan, lembaga kearsipan mengalami perubahan menjadi Arsip Negeri.

Perubahan nama lembaga ini kembali terjadi pada 1959, Arsip Negeri berubah nama menjadi Arsip Nasional. Pada masa ini Arsip Nasional bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri PP dan K dan memiliki tugas yang lebih luas daripada sebelumnya. Pada masa ini Arsip Nasional selain bertugas menyimpan dan merawat arsip pemerintahan dan partikelir/ swasta, juga bertugas untuk mengembangkan masalah kearsipan. Pada 1961, Arsip Nasional mengalami perluasan tugas dan fungsi, di mana Arsip Nasional tidak hanya berperan dalam penyelenggaraan arsip statis tetapi juga berperan dalam penyelenggaraan arsip dinamis. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden No. 19 Tahun 1961.

Namun dalam kenyataannya, Arsip Nasional hanya berperan dalam mengurus arsip statis, sedangkan kewenangan untuk mengakses arsip dinamis tetap berada pada instansi masing-masing. Perluasan peran Arsip Nasional baru benar-benar terjadi pada tahun 1971 dalam masa kepemimpinan Soemartini. Pada



Ada dua poin yang saya sampaikan saat pelantikan, pertama titik beratnya adalah bagaimana kita bisa membangun, mengembangkan arsip agar lebih berperan dalam konteks di seluruh kementerian dan lembaga pusat dan daerah, kemudian yang ke dua terkait bagaimana semua daerah bisa mengembangkan memori kolektifnya sehingga nanti diintegrasikan oleh Arsip Nasional



masa ini lahir Undang-Undang No. 7 Tahun 1971 tentang Pokok-Pokok Kearsipan. Mengenai hal ini, Kepala Arsip Nasional RI, Mustari Irawan dalam wawancara dengan redaksi Media Kearsipan Nasional menyatakan “ketika dirumuskan, ditetapkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1971 tentang pokok-pokok kearsipan, saya kira itu suatu momentum yang sangat penting sekali bagi dunia kearsipan, jadi di situ memang menegaskan tentang arsip sebagai sebuah lembaga dan juga arsip sebagai sebuah naskah. Ini sangat menarik sekali karena kita bisa melihat bahwa arsip mempunyai peranan yang sangat besar sekali dalam pemerintahan.” Lahirnya Undang-Undang ini menjadi momentum dan digunakan sebagai dasar ditetapkannya hari kearsipan yaitu pada 18 Mei 1971. Pada tahun berikutnya, yaitu 1974 berdasarkan Keputusan Presiden, Arsip Nasional berubah nama menjadi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan langsung bertanggungjawab kepada

Presiden.

Perubahan terus terjadi pada ANRI, dalam perkembangan berikutnya yaitu pada masa kepemimpinan Noerhadi Magetsari, Arsip Nasional RI mengalami pengembangan struktur organisasi di mana dalam struktur organisasi muncul Deputy Pembinaan, Deputy Konservasi, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan memperluas cakupan wewenangnya dengan membentuk Arsip Nasional Wilayah sebagai instansi vertikal di Daerah Tingkat I.

Pada perkembangan berikutnya yaitu masa kepemimpinan Mukhlis Paeni dirumuskan visi dan misi ANRI serta diterbitkannya program Citra Daerah. Dalam hal ini menurut Mustari Irawan, program Citra Daerah merupakan bagian dari implementasi visi ANRI, yaitu mendorong daerah untuk mengumpulkan dan mengoleksi memori kolektif daerah yang kedepannya akan disinergikan menjadi memori kolektif bangsa.

Oman Sjachroni sebagai Kepala ANRI berikutnya mulai mengembangkan Sistem Kearsipan Nasional dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikenal sebagai Sistem Pengelolaan Arsip berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIPATI).

Djoko Oetomo menjadi Kepala ANRI berikutnya setelah Oman Sjachroni. Dalam masa kepemimpinannya, Djoko Oetomo membangun diorama untuk lebih memperkenalkan arsip kepada masyarakat. Pada masa ini pula lahir Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang menggantikan Undang-Undang No. 7 Tahun 1971. Perubahan besar terlihat dari pengertian arsip, dimana dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1971 yang dimaksud dengan arsip adalah naskah-naskah, sedangkan dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 arsip adalah rekaman kegiatan dalam segala bentuk dan media. Undang-undang baru ini membawa perubahan yang signifikan dalam dunia kearsipan di Indonesia dimana UU No. 7 Tahun 1971 lebih fokus pada Arsip statis, sedangkan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tidak hanya fokus kepada arsip statis, tetapi juga kepada Arsip dinamis, jadi mulai dari awal sampai hulu, sudah diatur dalam Undang-Undang tersebut. Program Arsip Masuk Desa juga menjadi salah satu program yang dijalankan dalam masa kepemimpinan Djoko Oetomo. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan peran kepala dan sekretaris desa terhadap masalah kearsipan.

Menjabat sebagai Kepala ANRI berikutnya adalah M. Asichin. Dalam masa kepemimpinannya diselenggarakan program *Character Building* atau dikenal dengan Pembangunan Karakter Bangsa. Dalam hal ini ANRI bekerjasama



Kepala ANRI Mustari Irawan

dengan beberapa universitas di Indonesia untuk mengingat dan membangun kembali karakter positif bangsa Indonesia.

Sejak Desember 2013, ANRI berada dibawah kepemimpinan Mustari Irawan. Dalam kepemimpinannya, Kepala ANRI yang dilantik pada 27 Desember 2013, ingin membawa ANRI dengan visi dan misi perubahan. Dalam wawancaranya, Kepala ANRI yang memiliki nama lengkap Mustari Irawan ini mengatakan bahwa ia ingin menjadikan arsip sebagai pilar *Good Governance* dan integrasi memori kolektif bangsa. “Ada dua poin yang saya sampaikan saat pelantikan, pertama titik beratnya adalah bagaimana kita bisa membangun, mengembangkan arsip agar lebih berperan dalam konteks di seluruh kementerian dan lembaga pusat dan daerah, kemudian yang ke dua terkait bagaimana semua daerah bisa mengembangkan memori kolektifnya sehingga nanti diintegrasikan oleh Arsip Nasional. Saya punya obsesi bahwa secara kelembagaan, Arsip

Nasional punya peranan yang sangat besar di mana arsip itu harus kita bangun sehingga punya kontribusi, punya fungsi dan peran signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga dalam kehidupan bermasyarakat.”

Perkembangan kearsipan nasional saat ini sudah semakin pesat. Dalam UU No. 43 Tahun 2009 juga diatur mengenai Sistem Kearsipan Nasional (SKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) di mana ini merupakan pengembangan sistem arsip yang berbasis elektronik/digital. Kondisi ini sesuai dengan keinginan pemerintahan Jokowi, yaitu untuk membentuk *e-government*. Implementasi *e-government* dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, diharapkan dapat membuat pemerintah menjadi lebih efektif, efisien dan transparan. Penggunaan teknologi informasi diharapkan juga dapat menjadi salah satu cara untuk memberikan pelayanan yang cepat dan lebih baik kepada masyarakat.

Perubahan dalam dunia kearsipan

LAPORAN UTAMA

tidak hanya dalam bidang kebijakan nasional, tetapi juga pada pembinaan kearsipan nasional. ANRI saat ini juga dituntut untuk dapat memberikan pembinaan kepada seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah serta swasta yang memperoleh dana dari pemerintah. Objek binaan ANRI ada sekitar 1700 (seribu tujuh ratus) yang terdiri dari unsur instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN, perguruan tinggi negeri, organisasi masyarakat dan organisasi politik. Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di seluruh Indonesia juga tidak luput dari objek binaan ANRI. Pembentukan Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi (LKPT) sudah mulai dilakukan oleh beberapa PTN, diantaranya Universitas Gajah Mada (UGM), Institut Teknologi Sepuluh Noverber (ITS) dan Universitas Padjajaran (UNPAD). Keberadaan LKPT di UNPAD sangat dirasakan manfaatnya khususnya bagi civitas akademika di UNPAD. Dalam wawancara dengan Media Kearsipan Nasional, Rektor UNPAD periode 2007-2015, Ganjar Kurnia, mengatakan bahwa "UNPAD bertahun-tahun menyelenggarakan hari jadi pada 24 september seharusnya pada 11 september, ternyata 24 september itu adalah peresmiannya ketika presiden hadir, sedangkan surat keputusannya sendiri itu dikeluarkan tanggal 11 september, nah itu kami baru tahu seperti itu beberapa tahun ini saja sehingga kami ubah, dari mana sumbernya? Ya tentu dari arsip." Pendirian LKPT di UNPAD pada 2013 memperoleh dukungan penuh dari pimpinan sehingga saat ini UNPAD telah memiliki beberapa orang arsiparis dan gedung khusus untuk penyimpanan arsip. Ginanjar mengatakan "Kami sudah punya 4 orang arsiparis di universitas sekarang sudah fungsional, dan kami sudah punya 36 orang pegawai yang telah memperoleh pelatihan kearsipan, jadi dari pegawai biasa dilatih untuk menjadi arsiparis dan mendapatkan



Rektor UNPAD periode 2007-2015, Ganjar Kurnia

sertifikat dari ANRI, saat ini sedang proses untuk diangkat menjadi fungsional."

Kerjasama dengan PTN dalam bidang kearsipan tidak hanya dalam pembentukan LKPT di PTN, tetapi juga pada pembentukan program kearsipan dalam PTN. Dalam hal ini menurut Mustari Irawan, "kita bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi maka itu juga bisa dikembangkan bersama, dikembangkan secara keilmuan, sehingga bisa melahirkan orang-orang yang mengerti kearsipan. Kearsipan memang tidak murni ilmu atau pengetahuan tetapi juga harus dipraktekkan, ini dua hal yang harus dimiliki oleh perguruan tinggi dan memang sekarang ini kalau kita lihat hanya beberapa perguruan tinggi yang memiliki program studi itu dan memang kebanyakan masih D3 (Diploma Tiga)." Ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan akan jabatan fungsional arsiparis. Kedepannya dibutuhkan lebih dari seratus ribu arsiparis di mana dalam satu eselon 2 (dua) atau setiap SKPD harus memiliki satu orang pejabat fungsional arsiparis. "Jadi saya ingin nanti semua

kementerian harus memiliki arsiparis dan saya sudah mengirimkan surat-surat kepada seluruh kementerian melalui sekjen kementerian/lembaga supaya mengangkat arsiparisnya." Kepala ANRI juga menyatakan keinginannya untuk membentuk Sekolah Tinggi Kearsipan (STIKER), berikut pernyataannya "saya ingin membuat atau mendirikan Sekolah Tinggi Kearsipan, teman-teman menyebutnya STIKER. Membuka STIKER sebenarnya untuk mengantisipasi kemungkinan persaingan ketika kita memasuki Masyarakat Ekonomi Asean tahun ini dan termasuk dalam SDM."

Dalam menghadapi era baru dan untuk menjawab tantangan ke depan, ANRI bekerjasama dengan Kementerian PAN dan RB telah mengeluarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis. Terdapat beberapa perbedaan antara PERMENPAN No. PER/3/M. PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya dengan PERMENPAN dan RB No. 48 Tahun 2014 tentang

Jabatan Fungsional Arsiparis, diantaranya dalam PERMENPAN dan RB No. 48 Tahun 2014 ada perubahan dalam cara penilaian arsiparis. Dalam PERMENPAN dan RB ini tidak tercantum lagi mengenai nilai kegiatan arsiparis untuk diajukan sebagai angka kredit, cara penilaian arsiparis dengan menggunakan SKP. Perbedaan lainnya adalah tidak adanya pemberhentian sementara untuk jabatan fungsional arsiparis. Mengenai hal ini Kepala ANRI berpendapat “Hal ini memberi dorongan kepada arsiparis, ia harus bekerja secara profesional dan saya sebetulnya melihat arsiparis itu sebagai suatu profesi yang harus diimbangi dengan kreativitas dan inovasi jadi jangan terlalu bergantung pada instruksi jangan hanya menunggu, tetapi bagaimana dia bisa membangun dirinya dan menciptakan suatu pekerjaan. Dengan PERMENPAN ini saya lalu berharap bahwa arsiparis semakin menjaga profesinya.” Kehadiran PERMENPAN baru tidak otomatis meningkatkan daya saing tetapi dapat memberikan dorongan arsiparis di Indonesia untuk lebih profesional.

Arsiparis sebagai jabatan fungsional profesional di bidang kearsipan, dituntut untuk selalu menambah wawasan dan pengetahuannya terutama di bidang kearsipan sesuai dengan perkembangan jaman. Pada era *e-government*, arsiparis diharapkan mampu untuk mengimplementasikan *e-archive* dalam pekerjaannya. Arsiparis juga diharapkan dapat berperan lebih besar lagi dalam bidang kearsipan. Sebagaimana dikatakan oleh Kepala ANRI saat ini, “Saya sebenarnya menginginkan arsiparis itu memiliki peranan yang lebih besar dari sekarang, saya punya obsesi bagaimana kalau arsiparis itu seperti layaknya auditor atau layaknya seperti seorang peneliti. Jadi kalau kita lihat misalkan seorang peneliti, ketika ada kasus-kasus politik misalnya dalam

pilpres, yang di wawancarai oleh wartawan bukan Kepala LIPI, tetapi yang diwawancarai adalah peneliti di LIPI yang terkait dengan masalah sosial politik. Mereka bisa bicara secara nasional. Contoh lainnya adalah auditor, bagaimana auditor bisa berperan dalam memberikan masukan-masukan kepada setiap kementerian dan lembaga. Arsiparis menurut hukum memiliki peranan yang sangat besar sekali, tinggal bagaimana itu dirumuskan. Saya menginginkan arsiparis itu pertama harus berpikir untuk berubah jadi jangan terlalu asyik dengan hal-hal yang sifatnya rutin, tetapi bagaimana arsiparis itu bisa lebih segar lagi, lebih punya hasrat dan semangat untuk berubah. Untuk itu saya sudah mencoba mendorong arsiparis mengikuti seminar internasional. Tahun lalu saya minta arsiparis yang senior, untuk bicara di SARBICA, hal ini semata-mata untuk menambah kepercayaan diri arsiparis, bahwa arsiparis itu sama dengan fungsional yang lain.”

Sertifikasi jabatan fungsional arsiparis juga menjadi agenda ANRI sejak 2009 hingga saat ini. Tuntutan akan arsiparis yang profesional, disambut ANRI dengan memberikan sertifikasi terhadap arsiparis. Untuk memperoleh sertifikasi, seorang arsiparis harus menjalankan serangkaian tes/ ujian yang menentukan apakah arsiparis tersebut layak memperoleh sertifikasi keahlian dalam bidang tertentu atau tidak. Saat ini untuk sertifikasi baru tersedia sertifikasi arsip dinamis dan sertifikasi arsip statis, dan baru sekitar 442 orang dari 3241 arsiparis atau sekitar 13,64% (data 2009-2013). Dengan sertifikasi yang diperoleh, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan, kepercayaan diri arsiparis yang bersangkutan serta kepercayaan masyarakat akan kemampuan arsiparis tersebut. Sertifikasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing arsiparis

dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan mulai diberlakukan pada 2015. Dampak dari MEA adalah persaingan bebas di bidang permodalan, barang dan jasa serta tenaga kerja. Artinya di era MEA, persaingan akan semakin ketat, termasuk dalam bidang pekerjaan, di mana arsiparis juga akan bersaing dengan tenaga kerja asing ASEAN. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika arsiparis dituntut untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan kemampuan khususnya dalam kearsipan. Mengenai hal ini, Mustari mengatakan “Sertifikasi itu sebetulnya sebuah pengakuan secara formal terhadap kompetensi seseorang khususnya di bidang kearsipan. Apabila arsiparis benar-benar profesional, dia bisa ditempatkan dimana saja apakah itu di pemerintah, swasta, atau di BUMN. Oleh karena itu komponen penilaian saat melakukan sertifikasi itu harus benar-benar jadi instrumennya harus benar. Saya tidak lebih menekankan kepada jumlah tetapi kepada kualitas ketika sudah memberikan sertifikasi bisa dipertanggung jawabkan baik secara moral, maupun sebagai suatu profesi itu yang jauh lebih penting jadi nanti dia bisa berkiprah dimana saja, sebaiknya ada semacam spesialis.”

Pemerintahan Jokowi memiliki sembilan agenda perubahan (Nawa cita). ANRI dapat mengambil peranan guna membantu Pemerintahan Jokowi dalam mencapai Nawacita. ANRI sebagai lembaga negara yang menyimpan arsip-arsip pemerintahan dengan nilai pertanggungjawaban nasional berperan besar dalam upaya membangun pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Hal ini sesuai dengan salah satu agenda nawacita yaitu membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Visi ANRI sebagai Simpul Pemersatu

LAPORAN UTAMA

Bangsa juga dapat menjawab agenda perubahan mempertahankan kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Khazanah ANRI juga dapat digunakan sebagai bahan untuk mengingatkan kembali karakter-karakter positif bangsa Indonesia dan sebagai bahan dalam upaya melakukan revolusi karakter bangsa. Berikut pernyataan Menteri PAN dan RB, Yuddy, “Kemajuan peradaban suatu tatanan masyarakat juga ditentukan oleh kesadaran masyarakatnya tentang keberhasilan-keberhasilan dan kegagalan-kegagalan di masa lalu, sehingga masyarakat mampu melakukan tindakan-tindakan korektif serta mengembangkan dirinya untuk menata suatu peradaban baru yang lebih menjanjikan keadaan yang lebih baik. Maka disitu lah peran dimana arsip nasional untuk menyajikan segala bentuk informasi yang diperlukan masyarakat dan juga menyajikan dokumen-dokumen sejarah, sejarah kebangsaan, sejarah pemerintahan dari jaman ke jaman dan hal-hal yang mampu meningkatkan dan memberikan wawasan yang luas bagi masyarakat yang memerlukan informasi dari ANRI. Jadi berbicara tentang Nawacita tentu ANRI memiliki peran di dalam memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, bedanya adalah kalau pelayanan-pelayanan sebelumnya sifatnya pasif atau paling tinggi reaktif atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat mengenai berbagai macam informasi kesejarahan seperti dokumen-dokumen pemerintahan. Nawacita mengharapkan ANRI berperan responsif, lebih aktif di dalam menyebarkan pengetahuan guna meningkatkan wawasan masyarakat tentang sejarah peran pemerintahan, tentang hal-hal perbaikan dan koreksi-koreksi untuk perbaikan-perbaikan masa depan.” Dalam kesempatan yang berbeda, Yuddy juga mengatakan “Keberadaan arsiparis amat mendukung terlaksananya program



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Men PAN & RB) Yuddy Chrisnandi

Nawa Cita, tepatnya pada program kedua yakni membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.”

Era pemerintahan baru juga menjadi era baru bagi dunia kearsipan. ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional harus mampu mengikuti perkembangan dengan melakukan berbagai perubahan. ANRI juga harus mampu menjawab berbagai tuntutan dalam menyediakan informasi kepada

publik. Sebagaimana dikatakan Yuddy Chrisnandi “negara tidak pernah absen di dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya dalam hal tata kelola pemerintah yang efektif, yang berkeadilan, yang menegakkan hukum, dan seterusnya. Masyarakat ini memiliki berbagai macam kepentingan untuk mendapatkan informasi, Arsip Nasional merupakan salah satu sumber informasi yang diperlukan oleh masyarakat.” Pesan Yuddy dalam wawancara dengan Media Kearsipan Nasional “Jadi ANRI itu

jangan hanya menjadi penyelenggara kegiatan kearsipan rutin tetapi harus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pemerintah ini punya segudang informasi.” Menjawab hal tersebut, sejak 2009 ANRI telah memiliki diorama sebagai salah satu sarana sosialisasi kepada masyarakat mengenai arsip dan informasi yang bisa diperoleh dari arsip. Hal ini disambut baik oleh Yuddy Chrisnandi dengan memberikan arahan kepada para pimpinan lembaga kearsipan provinsi dan kabupaten/kota dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Kearsipan Nasional dan Sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 48 Tahun 2014 yang diselenggarakan di ANRI pada 31 Maret 2015. Demikian arahan Yuddy Chrisnandi “Saya meminta dengan sangat kepada Kepala ANRI, Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan hari ini jadikan momentum untuk membangun peta jalan dan pemetaan di provinsi mana yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, bisa disebarluaskan kepada publik dengan memadai, diorama-diorama yang lengkap. Saya mengharapkan sekurang-kurangnya empat tahun kedepan, atau selambat-lambatnya awal tahun 2019 di seluruh wilayah tanah air ini, paling tidak sudah ada cikal-bakal dioramanya masing-masing.”

Diorama di ANRI bukan hanya satu-satunya sarana sosialisasi kepada masyarakat, ANRI juga memiliki ruang layanan arsip yang senantiasa siap sedia melayani masyarakat yang membutuhkan informasi melalui arsip. Sebagai upaya memberikan pelayanan yang maksimal dalam menyediakan informasi, ANRI bekerjasama untuk meningkatkan/memperbanyak khasanah arsip dengan beberapa lembaga dan kementerian serta beberapa negara. Kegiatan digitalisasi juga dilakukan



Pembangunan diorama merupakan salah satu cara inovatif di dalam memberikan akses informasi arsip kepada publik dengan cara menggabungkan unsur arsip, seni, dan teknologi (Dok. HM. ANRI)

“ Keberadaan arsiparis amat mendukung terlaksananya program Nawa Cita, tepatnya pada program kedua yakni membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya ”

untuk mempermudah akses publik terhadap arsip dan sebagai upaya preservasi arsip. Dan untuk lebih memperkenalkan lagi arsip Indonesia serta memperlihatkan kehebatan Indonesia kepada dunia, ANRI mengusung arsip Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non Blok sebagai *Memory of The World*. Mengenai hal ini Kepala ANRI, Mustari Irawan mengatakan “Khazanah-khazanah yang bisa memberikan gambaran peranan Indonesia di dunia internasional

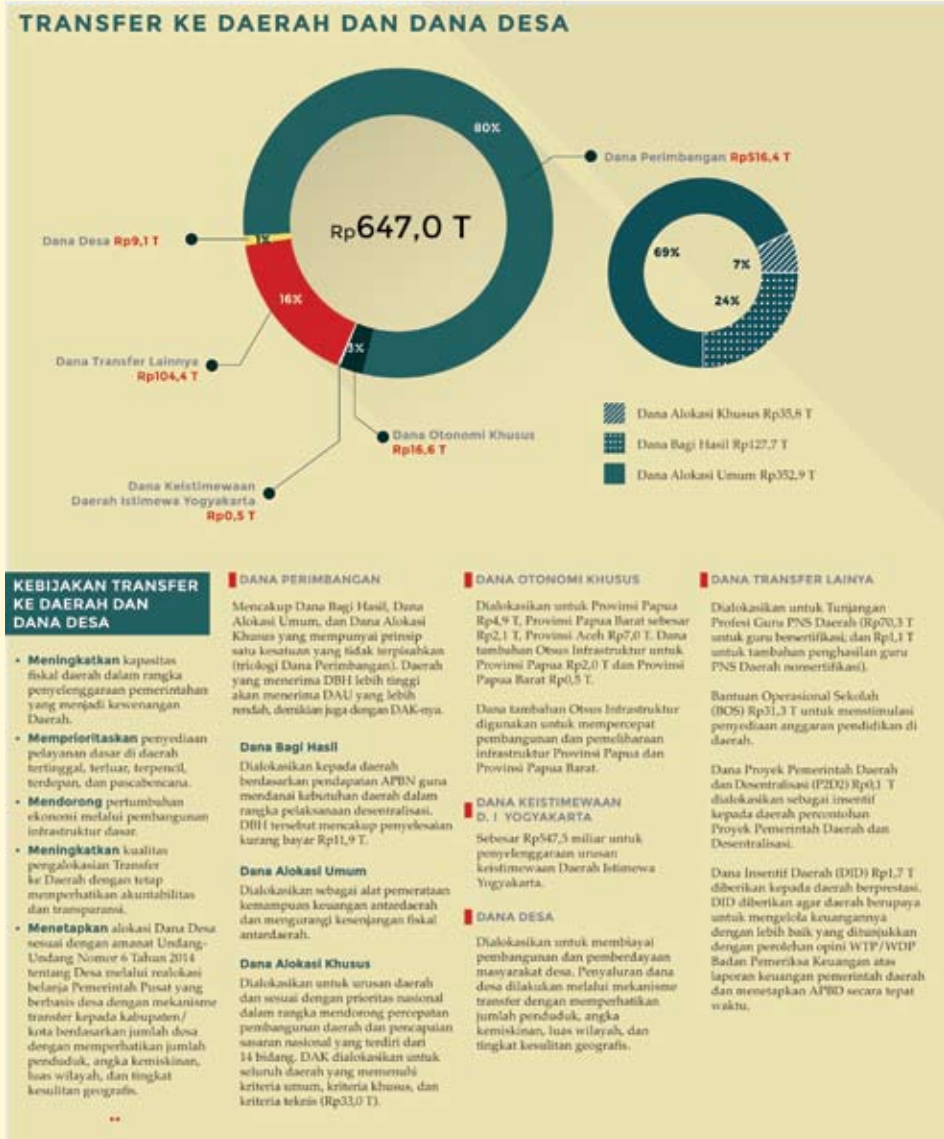
itu harus kita sebar, kita harus diseminasikan. Ini bukan semata-mata untuk memberikan kekuatan kepada kita dalam rangka melakukan penyelamatan penyimpanan dan juga preservasi tetapi juga mengangkat, menghidupkan kembali peranan Indonesia, menghidupkan kembali mengenai bangsa Indonesia di masa yang lalu bahwa sebenarnya kita adalah bangsa yang sangat besar, dan mempunyai peranan yang sangat penting.” (Santi)

Rayi Darmagara : DANA DESA DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAANNYA

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa yang keberadaannya pada masa dahulu terlupakan dan tidak diperhatikan, saat ini menjadi prioritas utama dalam pembangunan. Desa sudah menjadi garda terdepan pembangunan di daerah, setidaknya Pemerintah melalui APBN 2015 menetapkan kucuran dana desa senilai Rp 9,1 triliun, ditambah dengan usulan RAPBN 2015 mencapai Rp 20 triliun. Terhadap dana ini pemerintah sudah mengeluarkan rincian dana desa perkabupaten dan kota penerima dana desa, meskipun jumlah dana desa tersebut masih sangat jauh dari amanat UU Desa yang mengalokasikan Rp 1,4 miliar untuk setiap desa di Indonesia.

Secara garis besar program ini sesuai dengan program nawacita pemerintahan Joko Widodo, disana tertuang program untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dalam cita ini, pemerintah berkomitmen menjadikan desa sebagai ujung tombak pelayanan publik.

Tentu saja hal ini memberikan konsekuensi terhadap kesiapan Kepala Desa yang harus mampu mengelola



Sumber: APBN 2015, Kementerian Keuangan RI

dana tersebut dengan transparan dan akuntabel. Kepala Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah

pemegang kekuasaan desa. Kepala Desa harus memiliki kemampuan menyusun agenda pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban. Apabila para kepala desa tidak hati-hati atau tidak mampu mengatur dan pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai aturan, maka sebagai konsekwensinya mereka bisa berhadapan dengan sanksi hukum. Penggunaan dana desa rentan dengan penyelewengan dan penyalahgunaan sehingga akuntabilitas penggunaannya mutlak diperlukan oleh setiap Kepala Desa.

Arsip sebagai Wujud Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dijelaskan bahwa asas umum pemerintahan yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan salah satu asasnya adalah akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan harus dilaporkan oleh Kepala Desa pada tiap semester tahun berjalan. Pelaporan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan dalam penggunaan dana desa. Pelaporan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa harus bersumber pada arsip yang tercipta. Sehingga penyelenggaraan kearsipan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dimana terwujudnya asas akuntabilitas yaitu penyelenggaraan kearsipan harus memperhatikan arsip

sebagai bahan akuntabilitas dan harus bisa merefleksikan kegiatan dan peristiwa yang direkam.

Arsip adalah jawaban dan perangkat utama dalam akuntabilitas penggunaan dana desa, arsip melalui pengelolaannya merupakan solusi tepat bagi Kepala Desa agar terhindar dari malpraktek pengelolaan dana desa yang berujung pada pemidanaan bagi Kepala Desa karena terindikasi terjadi praktek korupsi.

Secara berjenjang, ANRI diamanatkan melakukan proses pembinaan sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan kepada pencipta arsip tingkat daerah yaitu pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten/kota, BUMD dan pemerintahan desa. Selain itu, Lembaga Kearsipan daerah kabupaten/kota juga bertanggung jawab melakukan pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah kabupaten/kota yang meliputi satuan kerja perangkat daerah, penyelenggara pemerintahan, pemerintahan desa, organisasi kemasyarakatan, dan perusahaan daerah kabupaten/kota dan desa serta perusahaan swasta berskala kabupaten/kota.

Terminologi arsip sebagai rekaman kegiatan dalam lingkup yang lebih kecil yaitu pemerintahan desa dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus mampu mencerminkan kegiatan tersebut terlebih khusus mengenai pembagian dana desa. Ini artinya bahwa arsip yang tercipta dari kegiatan dana desa harus memenuhi unsur isi/konten yang otentik, utuh dan terpercaya, konteksnya sesuai kegiatan/fakta dan strukturnya menggambarkan kegiatan dana desa.

Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sudah dapat diprediksi bahwa arsip yang tercipta dari pengelolaan dana desa diantaranya, pertama, peraturan Desa tentang APBdesa. Kedua, rencana Anggaran Biaya Desa. Ketiga, buku Kas Pembantuan Kegiatan. Keempat, surat Permintaan Pembayaran. Kelima, pernyataan Tanggungjawab Belanja. Keenam, penatausahaan, yang meliputi: buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank desa. Ketujuh, laporan Realisasi Pelaksanaan APBdesa semester. Kedelapan, laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBdesa.

Dari kegiatan tersebut, peran Lembaga Kearsipan daerah kabupaten/kota dalam mengupayakan sinergitas antara arsip yang tercipta dengan kewajiban pengelolaan arsip dinamis yang diatur dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Kearsipan, untuk kegiatan penciptaan arsip diperlukan penetapan tata naskah dinas, klasifikasi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Pada kegiatan penggunaan arsip harus mampu menjamin ketersediaan dan autentisitas arsip. Pada kegiatan pemeliharaan arsip harus melakukan pemberkasan arsip aktif dengan membuat daftar arsip aktif yang terdiri atas daftar berkas dan daftar isi berkas, dan melaksanakan penyimpanan arsip, serta melakukan penyusutan arsip yang berdasarkan JRA.

Sinergi antara arsip yang tercipta dengan pengelolaan arsip yang mampu menjawab akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

ARTIKEL LAPORAN UTAMA

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.

Blue Print Pengelolaan Arsip Dana Desa

Menurut data Kementerian Dalam Negeri dalam buku induk kode dan data wilayah administrasi pemerintahan per provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan seluruh Indonesia, terdapat 72.944 wilayah administrasi desa dan 8.309 wilayah administrasi kelurahan. Sehingga total wilayah administrasi setingkat desa dan kelurahan sebanyak 81.253. Atas dasar hal tersebut diperlukan blue print dalam mencapai sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan terhadap pengelolaan arsip dana desa.

Sebagai wilayah terdekat dengan desa, Lembaga Kearsipan daerah kabupaten/kota harus mampu memberikan solusi dan mampu menjawab kekhawatiran para Kepala Desa dengan pengelolaan arsip yang baik dan benar. Keberadaan dana desa merupakan berkah LKD kabupaten/kota dalam memfungsikan pembinaannya kepada Desa, dengan membentuk *blue print* pengelolaan dana desa, lebih jauh pengelolaan arsip pemerintahan desa.

Pengelolaan dana desa yang berdasarkan peraturan dengan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban dari arsip yang tercipta harus mampu dikelola dengan baik sehingga dapat diuji melalui pemeriksaan keuangan oleh BPK. Lembaga Kearsipan perlu melakukan penyusunan strategi penanganan arsip pengelolaan dana desa melalui pembinaan dan lebih jauh bahwa Lembaga Kearsipan bertanggung jawab terhadap arsip sebagai bahan pertanggung jawaban daerah sehingga pada akhirnya



Program Arsip Masuk Desa merupakan upaya ANRI dalam memberikan pemahaman masyarakat pedesaan terhadap pentingnya arsip dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Dok. HM.ANRI)

dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat luas dalam rangka pemenuhan hak untuk memperoleh informasi dalam berbagai kebutuhan dan kepentingan.

Program Arsip Masuk Desa (AMD)

Sebenarnya, sudah jauh-jauh hari ANRI berperan terhadap peningkatan pemahaman masyarakat pedesaan terhadap pentingnya arsip dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan kebangsaan melalui Peraturan Kepala ANRI Nomor 08 Tahun 2009 tentang Program Arsip Masuk Desa yang selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Kepala ANRI Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Hanya saja, berdasarkan perka tersebut program ini dilaksanakan selama lima tahun, mulai tahun 2009 sampai dengan 2014. Melalui program ini, diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat pedesaan tentang pentingnya arsip sehingga mereka menjadi tanggap terhadap hak-hak keperdataan, hak-hak politik dan mengetahui sumber daya alam

yang ada di desanya serta tanggung jawab mereka dalam membangun desa.

Perlu digalakkan kembali Program Arsip Masuk Desa melalui kerjasama dengan LKD kabupaten/kota, sehingga tujuan penggunaan dana desa untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa selaras dengan tujuan penyelenggara kearsipan yaitu menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Keselarasan tujuan tersebut memberikan angin surga bagi kepala desa dan perangkat desa dalam menciptakan tertib arsip pengelolaan dana desa sehingga kekhawatiran terhadap pemeriksaan dan pelaporan dapat teratasi.

Sumrahyadi :

KABINET, PROGRAM, DAN HARAPAN BARU BIDANG KEARSIPAN

Setelah memasuki lebih dari enam bulan Kabinet Kerja pimpinan Presiden terpilih Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan visi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, telah memunculkan program kerja baru dengan beberapa skala prioritas. Prioritas tersebut tertuang ke dalam 9 (sembilan) agenda yang dikenal dengan istilah Nawa Cita, dengan masih menonjolkan tata pemerintahan yang bersih, efektif, bebas korupsi dan sekaligus dengan melakukan revolusi mental. Selain itu, juga ditekankan perlunya keamanan nasional dan kehidupan politik yang demokratis. Kemandirian ekonomi menjadi suatu keharusan dengan didukung oleh pembangunan infrastruktur yang memadai.

Secara khusus untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, inovatif dan partisipatif telah dibangun berbagai system informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) baik dalam bidang layanan seperti perijinan, pengadaan barang dan jasa serta layanan lainnya. Sistem layanan yang terpadu ini merupakan salah satu wujud dari *electronic government* (E-Gov) yang memang menjadi tuntutan zaman pada masa sekarang ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) melalui Deputi Bidang Kelembagaan Tata Laksana

telah membuat bahan pertimbangan penyusunan kabinet baru terutama untuk mengantisipasi era pemerintahan yang baru setelah masa berakhirnya kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) Kementerian PAN RB sedang menyusun Rancangan Undang-Undang e-gov sebagai wadah hukum untuk memperkuat pelaksanaan e-gov sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-gov. Inpres ini memang dirasakan kurang gaungnya

dalam implementasi sehingga perlu dibuatkan Undang-Undang secara khusus. Undang-Undang ini juga rencananya secara lebih teknis lagi akan dijabarkan dengan Rancangan Peraturan Presiden tentang *Grand Design E-Gov* dan *Master Plan E-Gov* (Sumber: Program Kementerian PAN RB Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Majalah Layanan Publik, Edisi L.2014:40)

Harapan Baru Bidang Kearsipan

Program Kementerian PAN RB tersebut di atas secara lebih rinci diwujudkan dalam bentuk yang lebih teknis lagi yang menurut



Penyelenggaraan kearsipan berbasis *E-Government* melalui pembangunan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) merupakan upaya Arsip Nasional Republik Indonesia dalam memberikan informasi yang autentik dan tuntas dalam mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara dan memori kolektif bangsa dalam kerangka NKRI

istilah Kementerian PAN RB adalah “flagship”. Ada enam *flagship* yang akan dirumuskan secara mendalam, antara lain adalah *Government Cyber Security, Government Internet Exchange, Government Service Bus, Integrated Government Data Center, National Single Window Extended*, dan pengembangan sistem pelayanan perijinan. Dari enam *flagships* tersebut, kegiatan *Integrated Government Data Center* ini nampaknya yang dapat dijadikan kegiatan utama yang dikoordinasikan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Peran aktif ANRI sangat dibutuhkan untuk ikut mewujudkan program tersebut.

Pemahaman *integrated government data center* pada dasarnya adalah suatu pusat data dari kegiatan pemerintahan yang terpadu. Sehingga seluruh data pemerintahan terintegrasi dengan mudah dapat diakses untuk bahan pengambilan keputusan dan untuk meningkatkan layanan publik yang prima. Pada beberapa negara sudah terbentuk kelembagaan dan sistem aplikasi ini seperti Korea dan beberapa negara lainnya.

Secara konsep lebih jauh lagi dijelaskan bahwa pada prinsipnya data merupakan bagian dari informasi atau merupakan bahan mentah untuk diolah menjadi informasi. Pemahaman ini sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, disebutkan bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik (Pasal 1, ayat 1). Sedangkan pengertian arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang

dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Konsep ini sejalan dengan program nawa cita dalam bentuk *open government*. *Open Government* di bidang kearsipan dilakukan dengan kegiatan pembangunan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) yang dimaksudkan agar terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta adanya keterbukaan informasi publik melalui pembentukan JIKN.

Dengan melihat pengertian tersebut maka informasi sangat terkait dengan arsip, sehingga dapat dikatakan bahwa arsip sebagai bahan untuk diolah menjadi informasi atau isi arsip itu sendiri merupakan informasi. Kemudian ditegaskan dalam salah satu Pasal pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bahwa semua yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik dikategorikan sebagai informasi publik.

Kemudian masih dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan disebutkan bahwa lembaga kearsipan nasional (ANRI) membangun (SIKN) untuk memberikan informasi yang autentik dan utuh dalam mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara dan memori kolektif bangsa dalam kerangka NKRI. SIKN merupakan sistem informasi arsip dinamis dan statis yang dikelola secara nasional, atau dengan kata lain merupakan sistem aplikasi yang memuat data dan informasi arsip yang tercipta pada lembaga negara.

Dengan melihat kedua peraturan perundangan tersebut di atas, nampaknya tidaklah berlebihan bahwa ANRI melalui SIKN yang dibangun dapat berfungsi sebagai pusat data dan informasi bagi seluruh

pemerintahan Negara (*Integrated Government Data Center*) yang merupakan salah satu dari program Kementerian PAN RB. Ini merupakan peluang bagi ANRI untuk menunjukkan perannya dalam kancah nasional sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pusat data dan informasi dari seluruh aktivitas pemerintah dan lembaga negara. Sebetulnya dari segi sistem dan aplikasi SIKN sudah siap untuk dijadikan sebagai pusat data dan informasi nasional, tinggal dukungan politis dari pimpinan yang masih diharapkan. Bahkan jaringan internet untuk mengakses seluruh informasi tersebut sudah terbentuk dalam wadah www.jikn.go.id.

Kalau kita lihat secara historis pada beberapa negara seperti Australia misalnya, pada akhir tahun 1990-an juga telah melakukan kegiatan yang serupa, yang mana Arsip Nasional Australia pada waktu itu berperan sebagai koordinator kegiatan tersebut. Hal ini cukup beralasan karena memang lembaga ini mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan kearsipan yang berfungsi sebagai sumber informasi.

Dengan dimasukkannya ANRI melalui SIKN sebagai pusat data dan informasi dari lembaga negara sesuai dengan program Kementerian PAN RB serta didukung oleh peraturan perundangan kearsipan, maka sekali lagi diharapkan peran ANRI menjadi lebih nampak secara nasional. Program ini menjadi peluang dan harapan baru bagi ANRI dengan memadukan program dari Kementerian PAN RB dan pelaksanaan dari salah satu dari tugas dan fungsi ANRI sebagai lembaga yang membangun SIKN dan membentuk JIKN. Karena berdasarkan kenyataan sekarang ini bahwa tingkat perkembangan implementasi SIKN belum menggembirakan disebabkan oleh beberapa hal, sehingga dengan diangkatnya kembali isu ini peran ANRI menjadi lebih nampak dan secara politis didukung oleh Kementerian PAN dan RB.

Banu Prabowo :

NAWA CITA DAN ARSIP: MENGGAJI KETELADANAN MELALUI ARSIP, MENUJU RENAISSANS INDONESIA

Poin ke delapan dari Nawa Cita adalah melakukan revolusi karakter bangsa. Permasalahannya bagaimana membangun karakter bangsa dengan menghubungkan dengan arsip? Ada pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Pengalaman sejarah peradaban Barat terutama masa renaissance/rennaissance (abad XIV-XVII) dapat digunakan sebagai analog bagaimana arsip bisa dijadikan acuan dalam membangun karakter bangsa.

Dalam sejarah peradaban Barat, renaissance adalah suatu zaman peralihan dari abad pertengahan (500-1500) menuju pencerahan. Zaman renaissance menunjukkan penolakan unsur-unsur tertentu dari cara pandang abad pertengahan (feodalisme, irrasional), menuju cara pandang hidup modern, rasional, ditandai dengan bangkitnya kembali bentuk-bentuk budaya klasik (keagungan Yunani Romawi), dan kemunculan sikap-sikap modern yang khas.

Renaissance merupakan peralihan menuju Zaman Modern, kata renaissance berarti "kelahiran kembali" dan ia digunakan untuk mengacu kepada usaha para seniman dan pemikir untuk memulihkan dan menerapkan pengetahuan kuno dan standar-standar Yunani Romawi. Selama renaissance para individu menunjukkan minat yang bertambah kepada kehidupan duniawi dan cita-cita yang sadar diri untuk menentukan nasib mereka sendiri, suatu sikap yang merupakan kunci modernitas.

Dua catatan penting dalam renaissance Barat adalah timbulnya semangat hidup baru, keinginan berubah menjadi yang lebih baik dengan mengacu pada penggalan pengetahuan dan standar kehidupan Yunani Romawi. Budi Hardiman (2011:7) menegaskan bahwa renaissance berarti kelahiran kembali kebudayaan Yunani Romawi Kuno,



Presiden ke-1 RI, Soekarno ikut di dalam antrian pada pemilihan umum tahun 1955

setelah berabad-abad dikubur oleh abad pertengahan di bawah pimpinan gereja. Warisan Romawi Yunani kuno dipelajari lagi oleh para cendekiawan yang masa itu disebut kaum Humanis. Renaissance bukanlah reproduksi kultur antik, tetapi interpretasi baru atasnya.

Dalam konteks Indonesia, renaissance sangat tepat diacu untuk mewujudkan point ke delapan dari program Nawa Cita yaitu membangun karakter bangsa lalu dengan cara apa? Merujuk model renaissance, terkait dengan arsip yaitu: digunakannya khazanah arsip statis untuk acuan keteladanan dalam membangun karakter manusia Indonesia. Menggali nilai-nilai keteladanan tokoh bangsa yang termuat dalam khasanah arsip, dengan membongkar mental korup, hipokrit, rakus, suka jalan pintas, mental menerabas, menjadi manusia Indonesia yang jujur, bertanggung jawab, sederhana dan tidak korup.

Dekadensi Moral Bangsa

Dekadensi moral bangsa mulai terlihat dari kejahatan kemanusiaan seperti penyalahgunaan narkoba, seks

bebas, korupsi, gaya hidup konsumtif dan hedonis. Bahkan kini telah terjadi banalitas terhadap dekadensi moral tersebut. Banalitas terjadi ketika tindakan itu menjadi kewajaran, menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja, bukan suatu pelanggaran yang harus dijatuhi sanksi sosial ataupun hukuman berat.

Mempbaiki dan mengubah karakter buruk dekadensi moral, menjadi karakter bangsa yang unggul seperti kemandirian, kesederhanaan hidup memerlukan kesadaran untuk berubah. Membangun kesadaran menuntut adanya acuan keteladanan (*benchmark*). Keteladanan ini salah satunya terdapat dalam nilai-nilai yang tersimpan pada catatan tokoh-tokoh bangsa yang di dalam arsip statis.

Peran Arsip dalam Membangun Karakter Bangsa

Arsip berisi jejak rekaman kegiatan, baik dihasilkan oleh lembaga maupun perorangan. Dari arsip perseorangan atau arsip tentang orang kita dapat mengambil berbagai

pelajaran. Perilaku, keteladanan para pendiri bangsa, pahlawan, dapat digali dari arsip tersebut, dengan demikian diharapkan selanjutnya akan mampu memandu dalam pembangunan karakter bangsa.

Jika, selama renaissans para individu menunjukkan sikap yang merupakan kunci modernitas, yaitu minat yang bertambah kepada kehidupan duniawi dan cita-cita yang sadar diri untuk menentukan nasib mereka sendiri (Perry, 297). Maka, dalam mewujudkan poin kedelapan Nawa Cita yang perlu dilakukan adalah membangun, menyebarkan kesadaran untuk meneladani tokoh-tokoh nasional, baik yang sudah ada dalam bentuk khazanah arsip maupun dalam bentuk wawancara sejarah lisan .

Beberapa keteladanan yang dapat dijadikan contoh: Pangeran Diponegoro (1785-1855), misalnya. Diponegoro digambarkan sebagai “pejuang restorasi” keluhuran kedudukan Agama Islam di Jawa. Diponegoro mencita-citakan pemulihan atau restorasi tata nilai moral yang lebih luas (xxvi). Karakter yang dapat diteladani: sifat kepekaan sebagai manusia terutama dalam mengenali kompleksitas dunia, tampil sederhana, kepedulian pada rakyat, tak suka terhadap sikap angkuh, suka pamer. Ia adalah contoh kejujuran, memiliki kreativitas yang kuat suatu kemampuan untuk terus bergerak dan menciptakan dunia baru. Kearifan Diponegoro adalah kearifan orang bersahaja, yang mengenali dan mengakui ada kerumitan, tetapi langsung bertindak apa adanya. Walaupun hidup di zaman serba sulit ia tetap menjaga integritasnya. Peter Carey sejarawan Inggris yang lebih dari 30 tahun meneliti Pangeran Diponegoro menyatakan bahwa sumber utama penulisannya adalah Laporan Residen Belanda di Arsip Nasional Republik Indonesia. (Peter Carey, 2014:x).

Keteladanan berikutnya dapat dilihat pada Ki Hadjar Dewantara (1889-1959), ia seorang tokoh pergerakan yang gigih membangun kesadaran berbangsa, gigih memperjuangkan kesetaraan pendidikan. Kegigihan dalam membangun kesadaran berbangsa ia tunjukkan dengan aktifnya dalam organisasi sosial dan politik. Perjuangan dalam membangun kesetaraan pendidikan terlihat pada kegigihannya mendirikan Perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata



Ki Hadjar Dewantara tokoh pendidikan yang dikenal dengan semboyan “*ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*” (di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan)

untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda.

Sikap hidup sederhana dan semangat egalitarian, menjauh dari sikap feodal ia tunjukkan dengan menggunakan nama “Ki” , meskipun beliau adalah termasuk bangsawan yaitu cucu dari Raja Pakualaman III. Alasan tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya agar dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun jiwa.

Selanjutnya Soekarno, keteladanan Presiden pertama RI ini, di samping sebagai seorang nasionalis sejati, ia dikenal sebagai pribadi yang hidup sederhana. Presiden Soekarno tidak mewariskan harta benda berlimpah ketika ia wafat tahun 1970. Ketika ia membangun Stadion Senayan yang ia pikirkan adalah prestasi olah raga bangsa tanpa pernah mengharapkan ada persentase komisi dari proyek. Bahkan Patung Dirgantara yang dibuat pada masa peralihan kekuasaan pada 1965 dibiayai sebagian dengan uang pribadi Soekarno. (Asvi Warman Adam, *Kompas*, 10/2)

Hatta adalah contoh keteladanan berikutnya (Dedi Purnama Eksan: 2014), ia dikenal hidup sederhana, tidak suka menggunakan fasilitas negara, anti korupsi, memiliki integritas sangat tinggi. Hatta tak pernah mau mengambil uang yang bukan haknya, ia pernah menyuruh asistennya untuk

mengembalikan dana taktis wakil presiden. Padahal, dana taktis ini tidak perlu dipertanggungjawabkan. Ia juga enggan menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi. Ketika ia meninggal tidak meninggalkan banyak harta warisan untuk keluarganya. Ia adalah tokoh yang menjaga kehormatan, ia menolak jabatan komisaris perusahaan dengan alasan “tidak enak, apa kata rakyat nanti..”

Tokoh-tokoh tersebut hanya sebagian dari tokoh nasional yang dapat dijadikan keteladanan dalam rangka ikut serta mewujudkan revolusi karakter bangsa melalui penggalian arsip, dan nilai-nilai keutamaan sebagai manusia.

Peran ANRI dalam Membangun Karakter Bangsa

Apa yang harus diperbuat Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam konstelasi membangun karakter bangsa? ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan sudah semestinya memiliki komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya (Pasal 3 UU No 43 th 2009), maka sudah seharusnya ANRI membuka lebar-lebar akses publik terhadap arsip maupun informasi tokoh teladan yaitu dengan menyediakan bahan arsip tentang tokoh-tokoh teladan yang ada dalam khazanah arsip, atau mengisi kekosongan khazanah arsip dengan metode sejarah lisan. Dengan demikian maka ANRI akan menunjukkan perannya dalam konstelasi nasional, pembangunan bangsa, memajukan karakter bangsa.

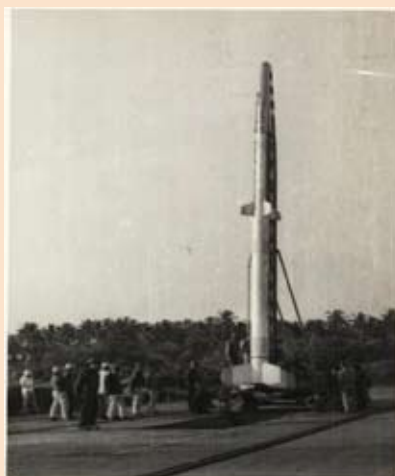
Dengan khazanah arsip yang dimiliki, ANRI dapat ikut serta berperan dalam pembangunan karakter bangsa sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu: melakukan pameran-pameran tokoh-tokoh teladan, melakukan penerbitan sumber-sumber arsip, seminar, diskusi tentang keteladanan tokoh-tokoh, menyediakan bahan ajar bagi siswa maupun mahasiswa tentang tokoh-tokoh teladan. Bagaimana ANRI, sudah siapkah dengan khazanah arsipnya ikut berperan serta dalam renaissans Indonesia, berpartisipasi aktif dalam mewujudkan poin kedelapan dari Nawa Cita, revolusi karakter bangsa??

Sumantri:

TAHUN 1965, INDONESIA MAMPU MENEMBUS ANGKASA LUAR

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan disebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kearsipan mempunyai peranan penting sebagai pusat ingatan maupun sumber sejarah, salah satu indikator dari hal tersebut kearsipan memberi informasi serta alat pengawasan yang sangat diperlukan organisasi dalam melaksanakan segala kegiatannya.

Dalam proses penyajian informasi pimpinan dapat membuat keputusan dan merencanakan kebijakan, serta memberikan informasi tentang prestasi awal berdirinya sebuah lembaga. Semaraknya fenomena peroketan di Indonesia pada awal periode 1960-an merupakan sebuah bukti bahwa orang-orang Indonesia sudah mampu melakukan alih teknologi. Pada masa inilah sebuah system peroketan telah dirintis dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu mencapai tahap awal standar pengembangan roket layaknya negara-negara maju yang menimbulkan beragam dampak dalam berbagai kehidupan di Indonesia, diantaranya adalah lahirnya Lembaga Penerbangan dan Angkasa Luar-LAPAN pada tahun 1963.



Roket Kappa 8 siap meluncur
(Koleksi Arsip dan Dokumentasi LAPAN)

Dari catatan sejarah visi dan misinya, LAPAN adalah sebuah lembaga yang mencoba menghimpun kebutuhan bangsa Indonesia dalam bidang penerbangan dan keantariksaan yang saat itu merupakan hal yang baru, terutama dalam hal keantariksaan yang banyak dipengaruhi oleh kemajuan-kemajuan yang didapat dari peristiwa perlombaan antariksa (*space race*) antara Amerika dan Uni Soviet membawa berkah terhadap kemajuan perkembangan teknologi di Indonesia.

Pertama, diadakannya *International Geophysical Years (IGY)* pada tahun 1957-1958 merupakan sebuah pertanda bahwa dunia sudah siap memasuki era litbang dan pemanfaatan teknologi antariksa secara internasional, namun pada kesempatan ini Indonesia tidak dapat memberikan kontribusinya dalam perhelatan riset berskala internasional. Akhirnya para komunitas sains internasional mencemooh



Roket Kappa-8 menembus angkasa luar
(Koleksi Arsip dan Dokumentasi LAPAN)

Indonesia sebagai Negara *Black Area* atau daerah hitam yang minim data ilmiahnya. Kedua, Keberhasilan misi ke luar angkasa yang dilakukan Uni Soviet dengan Vostok 1 pada tahun 12 April 1961 berhasil menjadikan Yuri Gagarin sebagai manusia pertama ke luar angkasa. Sedangkan Amerika Serikat dengan astronot Alan Shepard dan Gus Grisson pada 12 Juli 1961 mereka menjadi semakin populer dan menggugah publik dunia, begitu pula publik Indonesia. Keberhasilan tersebut juga menjadi perekat hubungan diplomatik Indonesia-Rusia disamping bayang-bayang konflik Irian Barat dan konfrontasi Indonesia-Malaysia. Hubungan sama-kin dieratkan dengan kunjungan Ir. Sukarno ke Moskow pada tahun 1961 bertemu PM Leonid Brezhnev dan Nikita Kruczhev, serta kosmonot Yuri Gagarin mereka diberikan Bintang Maha Putra oleh pemerintah Indonesia.

Pada abad 16 peroketan dalam artian negative telah dilakukan pada massa kerajaan Somba Opu di Indonesia (Nusantara) dimana perlawanan Sultan Hasanudin terhadap VOC, Belanda menggunakan meriam-meriam dan salah satu yang terbesar adalah meriam “Anak Makasar” dengan panjang 6m, berat 9ton dan diameter 41,5cm. Pada tahun 1960an berita mengenai keantariksaan terbaru selalu menghiasi koran-koran nasional dan menjadi bagian dari fenomena maraknya peroketan di Indonesia. Maraknya riset-riset peroketan yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Gajah Mada dengan roket Gama 1,2 dan 3 pada tahun 1963-1964 disusul Institut Teknologi Bandung dengan roket Ganesha X-1A, X-1B, X-2A dan X-2B pada tahun 1964. Sedangkan dikalangan Angkatan Darat yaitu roket Achmad Yani, Angkatan Udara dengan roket Kartika-1, roket Tjleret, Pasopati, Widya dan Yoga, Angkatan Laut dengan roket Seropkal. Hal ini membuktikan bahwa sudah ada aksi nyata bahwa bangsa Indonesia juga memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan transfer teknologi keantariksaan demi kepentingan nasional.

Untuk menjawab perkembangan zaman dan memulai kegiatan keantariksaan yang lebih sistematis akhirnya Dewan Penerbangan (DEPANRI) membuat suatu panitia teknis yaitu Panitia Astronautika yang khusus menangani masalah keantariksaan di Indonesia pada 14 desember 1962. Anggota-anggotanya terdiri dari Angkatan Udara (Letkol Udara Imam Sukoco, dan Mayor Udara Kirono), Departemen Perhubungan Udara (Ir. Karno Barkah dan Drs. M. Sukanto), Departemen Urusan Research Nasional (Dr. Tek Pik Sin), Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (Prof Sutardi Mangundoyo), dan Departemen Luar Negeri (Mr. Nugroho). Proyek Roket Ionosfer/



Guntingan berita Koran Kompas '65 kesuksesan Peluncuran Roket Tahun 1965. (Koleksi Arsip dan Dokumentasi LAPAN)

Angkasa luar, dengan nama lainnya Projek S adalah salah satu proyek yang diusulkan oleh panitia Astronautika th 1962. Projek S direncanakan untuk mengikutkan Indonesia ke dalam pelaksanaan *International Quite Sun Year 1964-1965*.

Pada tanggal 28 Agustus 1963 Presiden Sukarno menyetujui

pembelian roket dari Jepang hal ini dilandasi oleh dua faktor, pertama adalah guna memajukan kemampuan peroketan dalam negeri sebagai pertahanan dan keamanan negara serta memperkenalkan Indonesia dalam forum komunitas sains internasional melalui IQSY 1964-1965 dan sebagai The New Emerging Forces. Kedua adalah untuk mendukung politik konfrontasi yang pada saat itu sedang dilancarkan terhadap Malaysia. Selanjutnya Menteri/Panglima Angkatan Udara Omar Dhani menugaskan beberapa anak buahnya untuk menemui para ahli roket Ionosfer Jepang di Tokyo. Indonesia memutuskan membeli 10 buah roket Kappa-8 dari Jepang melalui Keputusan Presiden Nomor 242 Tahun 1963, dengan rincian US\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat), untuk pembelian system roket Kappa US\$ 2.000.000 (dua juta dollar Amerika Serikat) untuk pengembangan roket dan Rp. 3.000.000.000,- (3 miliar rupiah) untuk membangun suatu pangkalan peluncuran roket di Indonesia. Sebelum roket-roket tiba



Penurunan Roket-roket Kappa-8 dari pesawat Helikopter AU (Koleksi arsip dan Dokumentasi LAPAN)

di Indonesia, pada awal tahun 1965 dikirim pula tenaga-tenaga ahli yang telah berpengalaman ke Jepang untuk mempelajari ilmu peroketan dan dapat mengoperasikan peluncuran roket-roket Kappa-8 tersebut, mereka adalah sebagian dari team proyek PRIMA yang telah sukses meluncurkan Roket KARTIKA-1 dan Roket GAMA dan Roket GANESHA seperti Wiranto Arismunandar, Iskandar Alisyahbana, Oetardjo Diran, Samaun Samadikun, Baiquni, Kusumanto Purbasiswojo, Kisman Soebandi, Sukendro Wardoyo, Erawan Lambri dll. Nurtanio Pringgoadisuryo sebagai Dirjen Lapan, R.J Salatun selaku Pimpinan Proyek S/Ionosfer Angkasa Luar didampingi Ir. Koesoediarso Hadinoto selaku Penasehat Ilmiah Menteri/Pangau mengundang konsultan dari Jepang Prof. Hideo Itokawa guna merancang dan membangun stasiun peluncuran yang telah dipilih yaitu lokasi yang pernah digunakan peluncuran roket KARTIKA-1 di pantai selatan Pameungpeuk, Garut.

Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Indonesia roket Kappa-8-1 dapat diluncurkan dengan mulus pada tanggal 9 Agustus 1965 mencapai angkasa luar dengan ketinggian 334 km, jauh lebih tinggi dari jarak yang dapat ditempuh oleh astronot-astronot di seluruh dunia saat itu, hal ini merupakan sejarah besar dalam hal keantariksaan di Indonesia, bahkan dalam lingkup Asia-Afrika. Peluncuran sebuah wahana roket dari bumi Indonesia hingga mencapai luar angkasa merupakan peristiwa sejarah yang memiliki arti penting dalam bidang keantariksaan di Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 1965 roket Kappa-8-4 berhasil meluncur dengan ketinggian 250 km, tepat pada perayaan Hari Kemerdekaan



Pembangunan landasan luncur roket di Pameungpeuk
(Koleksi Arsip dan Dokumentasi LAPAN)



Menpangau Omar Dhani (tengah) kembali setelah melakukan inspeksi.
(Koleksi Arsip dan Dokumentasi LAPAN)

Indonesia tanggal 17 Agustus 1965 roket ketiga SK-8-3 ketinggian *direkord* hanya sampai 70 km. Arti penting dari peristiwa bersejarah tersebut bahwa untuk pertama kalinya roket telah diluncurkan dari bumi Indonesia dan sungguh-sungguh telah menembus batas antariksa melebihi tinggi orbit para kosmonot dan astronot pada saat itu. Data ilmiah yang diperoleh kemudian disumbangkan kepada Program IQSY 1964-1965 dalam *Symposium Space and Technology di Tokyo*. Peristiwa tersebut diatas

dapat diketahui masyarakat ilmiah internasional dalam IQSY 1964-1965, maka Indonesia akhirnya dapat dikeluarkan dari kategori *Black Area* sejak masa IGY tahun 1957-1958. Melalui PBB Indonesia diakui oleh dunia internasional sebagai Negara yang serius mengembangkan teknologi peroketan untuk menunjang program luar angkasa.

Ina Mirawati :

MELALUI ARSIP TERCIPTA BERAGAM KREATIFITAS SESUAI PROGRAM NAWA CITA

Pada tahun 1966 Presiden Soekarno berpidato di depan MPRS yang terkenal dengan Nawa Aksara (Nawaksara). Kemudian pada tahun 2015 Presiden Joko Widodo mengumandangkan programnya yang disebut Nawa Cita. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan di antara kedua Nawa tersebut terkait juga dengan situasi pada masanya.

Perbedaannya adalah Nawaksara Presiden Soekarno merupakan Sembilan Laporan pertanggungjawaban Presiden Soekarno yang ditolak oleh MPRS karena dinilai tidak lengkap. MPRS kemudian meminta Presiden Soekarno untuk melengkapi pidato tersebut walaupun akhirnya beliau diturunkan dari jabatannya sebagai Presiden RI. Sementara, Nawa Cita Presiden Joko Widodo bertujuan ingin meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga dapat mencapai akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam hal ini adalah tugas ANRI mengawal dan mewujudkan program Nawa Cita Presiden Joko Widodo tersebut. Beberapa program ANRI yang terkait dengan Program Nawa Cita ini, di antaranya adalah bahwa ANRI mempunyai arah kebijakan berhubungan dengan masalah pendidikan karakter dan pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal, peningkatan pemahaman



Padi yang baru dipanen disimpan di lumbung padi.
ANRI, RVD JaTim No. K80518 HW 1

tentang nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan, perlindungan, pengembangan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkuat khasanah budaya bangsa, meningkatkan promosi, diplomasi dan pertukaran budaya. Arah kebijakan ANRI lainnya adalah memfasilitasi terbangunnya repositories bagi produk-produk kreatif yang dimanfaatkan sebagai sumber inspirasi pada proses kreasi berikutnya. Untuk semua hal itu maka kegiatan yang dilakukan ANRI di sini adalah mengolah, menyelamatkan, memanfaatkan dan melestarikan arsip karya seni ekonomi kreatif dalam bentuk film, video dan fotografi. Tujuannya untuk pemanfaatan informasi arsip terkait nilai-nilai kearifan

lokal dalam rangka mendukung budi pekerti bangsa, dengan demikian sesungguhnya bahwa arsip merupakan sumber informasi yang dapat melahirkan banyak kreatifitas yang berguna bagi masyarakat dan negara.

Arsip sebagai Sumber Kreatifitas

Saat ini bidang kearsipan semakin rumit. Produksi arsip semakin meningkat seiring dengan laju pembangunan dan teknologi modern. Dari proyek Kedungombo tercipta satu truk arsip selama kurang dari satu tahun. Dari sebuah bank di Jakarta tercipta sepuluh kilometer arsip selama setahun. Pertamina bukan hanya memproduksi minyak mentah tetapi juga memproduksi arsip. Begitu

pula dengan perusahaan-perusahaan lainnya di seluruh dunia.

Mengingat jumlah arsip yang semakin besar dan tuntutan penggunaan arsip yang semakin meningkat, maka arsip perlu ditangani secara profesional. Bidang kearsipan mulai diakui sebagai suatu profesi dan munculah istilah arsiparis. Para arsiparis ini adalah sumber daya yang harus mampu menangani dan menyiarkan pentingnya arsip untuk menciptakan berbagai kreatifitas seperti ekonomi kreatif, salah satu program yang diinginkan Presiden Jokowi.

Gejala yang cukup menarik pada awal abad ke-21 adalah kebangkitan usaha kecil dan sektor informal dalam bentuk ekonomi dan industri kreatif. Berbeda dengan ekonomi kreatif di negara-negara industri maju, sebagaimana dikonsepsikan John Howkins dalam bukunya *The Creative Economy: How People Make Money From Ideas* (London: Penguin, 2001) yang bersumber pada ilmu pengetahuan dan teknologi modern, ekonomi kreatif di Indonesia lebih banyak bersumber pada pengetahuan dan kearifan lokal didukung oleh nilai-nilai budaya. Pemerintah sendiri memberi tanggapan positif dengan mendeklarasikan tahun 2009 sebagai Tahun Industri Kreatif, sehingga muncul kesadaran luas di tengah masyarakat mengenai potensi ekonomi rakyat yang didukung oleh ekonomi kreatif.

Ekonomi kreatif yang dimaksud di sini adalah gagasan orisinal yang bisa diperoleh seseorang yang sangat kreatif sehingga melahirkan bermacam ide dan dapat mengurangi jumlah pengangguran karena hasil kreatifitasnya memiliki nilai jual yang sangat dihargai dan hak ciptanya mendapatkan perlindungan secara legal. Ekonomi kreatif dapat menumbuhkan semangat berinovasi dalam dunia pendidikan sehingga



Para wanita di Sumatera Utara menjual kain sarong hasil buatan tangannya sendiri di pasar Simelung.
ANRI, RVD SumUt No. 80228 AA 1



Salah satu kerajinan hasil kreatifitas yang dibuat oleh orang Bali
ANRI, Kempen RI Jkt No. R550514 FG 2-2

generasi muda mampu melahirkan gagasan baru berdasarkan apa yang sudah dimiliki sejak dahulu. Oleh karena itu jika menginginkan adanya kesinambungan untuk mencapai suksesnya kreatifitas (dalam hal ini ekonomi kreatif) ataupun kreatifitas bentuk lainnya, maka arsip mempunyai peranan yang sangat penting karena arsip adalah sumber

dari kreatifitas tersebut dengan cara membandingkan bagaimana hasil yang pernah diraih pada masa lalu hingga sekarang. Sebagai contoh, jika kita ingin mendapatkan hasil padi yang berkualitas, maka melalui arsip kita dapat melihat perkembangannya dari tahun ke tahun. Kita dapat mengetahui bahwa ada saat di mana panen padi mengalami anjlok yang disebabkan oleh banjir atau terserang hama. Catatan yang ditulis oleh residen pada masa pemerintahan Hindia Belanda dapat menjadi acuan bagi kita dan dari catatan atau laporan tersebut dapat kita buat film bagaimana bercocok tanam dan menghasilkan padi yang baik serta cara menyimpan padi yang baru di panen di lumbungnya.

Para wanita di Sumatera Utara telah melakukan kreatifitasnya sendiri dengan membuat kain sarong yang dirancang secara tradisional kemudian menjualnya secara berkelompok di pasar yang ramai. Dari arsip foto yang dibuat sekitar tahun 1947 ini kita bisa menciptakan ekonomi kreatif yang dibalut dengan budaya suku bangsa Indonesia. Kita bisa membuat buku atau film mengenai sejarah

KHAZANAH

pembuatan kain sarung tradisional atau mengembangkan motif sarung sesuai dengan permintaan konsumen dengan tidak meninggalkan keunikan atau kekhasan tradisionalnya. Buku dan film disebar luaskan melalui media TV atau internet. Para pelajar, mahasiswa dapat diberi tugas untuk mengembangkan kreatifitasnya dengan melihat film atau membaca buku yang dibuat berdasarkan sumber arsip tersebut.

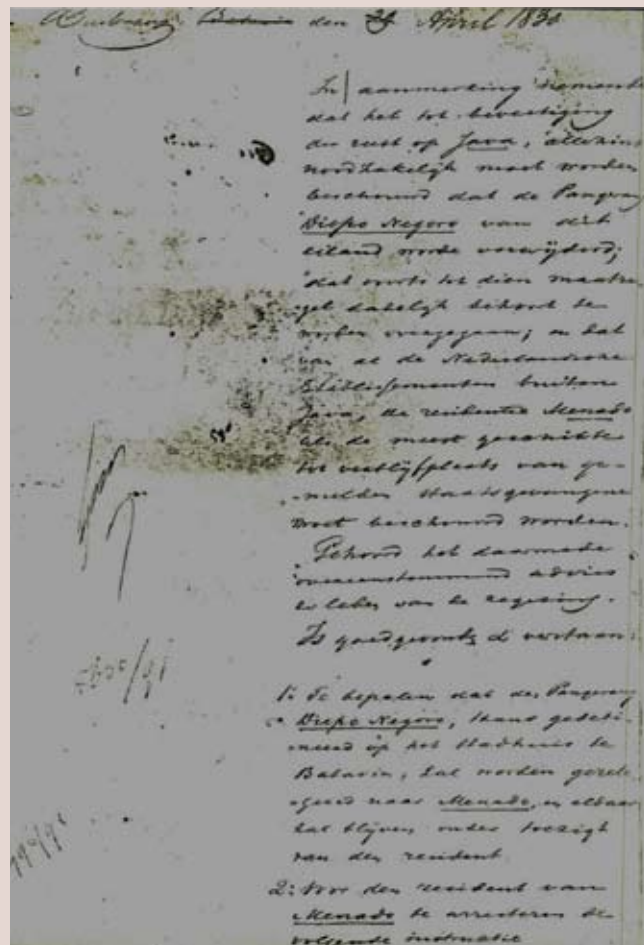
Ide kreatifitas lainnya dapat juga terinspirasi pada masyarakat di masa lalu yang membuat mainan atau barang kesenian dari pelepah pisang, semuanya berdasarkan sumber arsip foto atau video yang ada pada masa lalu. Ide ini kemudian dikembangkan menggunakan peralatan yang lebih modern serta pengetahuan lebih luas sehingga dapat tercipta hasil yang sangat kreatif. Semua hal yang kita temukan dalam arsip sangat menunjang kreatifitas kita karena ternyata apa yang masyarakat pada masa lalu lakukan, hingga sekarang masih ada yang kita contoh (seperti berbelanja ke pasar tradisional) walaupun tidak dapat kita pungkiri bahwa orang sekarang lebih menyukai berbelanja di supermarket yang ber AC, bersih, tidak becek daripada pasar tradisional. Namun demikian pasar tradisional tetap ada dan dipertahankan, diberi fasilitas dijaga kebersihannya serta ada yang digabungkan dengan pertokoan yang menjual baju batik, seperti Pasar Mayestik.

Selanjutnya ada kreatif lain yang dapat dibuat berdasarkan sumber arsip, yaitu film mengenai perlawanan Pangeran Diponegoro hingga akhirnya beliau dibuang ke Manado. Di dalam arsip Algemene Secretarie (Besluit tahun 1830) yang kita temukan, dilaporkan bahwa Pangeran Diponegoro dibawa ke Manado dengan menggunakan korvet (kapal) yang bernama Hr.M. Pollux dengan

dikawal oleh Letnan Ajudan 2 Knoerle. Film tersebut dapat dibuat berdasarkan sumber arsip foto dan arsip kertas mulai dari kehidupan Pangeran Diponegoro, perlawanannya terhadap Hindia Belanda pada tahun 1825 hingga 1830. Film yang dibuat bisa mengambil latar belakang kebudayaan tempo dulu, kemudian dikemas secara lengkap dan apik menggunakan teknologi modern sehingga menghasilkan suatu karya yang sangat kreatif dan menarik. Bukan hanya Diponegoro saja tetapi pahlawan lainnya dapat kita buat filmnya sehingga tercipta karya ekonomi kreatif. Melalui gaya pengemasan yang tidak bertele-tele dengan memakai sumber arsip maka film tersebut dapat dipasarkan ke berbagai sekolah dan dimanfaatkan

sebagai bahan pendidikan karakter bangsa.

Pada tahun 1950-an penjual jamu, penjual emas, penjual mainan anak-anak maupun penjual payung berdagang kebanyakannya di pinggir jalan yang strategis di mana banyak orang berlalu lalang. Mereka menggelar barang dagangannya di tanah dan para pembeli mengerumuni mereka untuk membeli atau hanya sekedar melihat-lihat. Kejadian ini hingga sekarang masih kita temui tetapi pemerintah RI sekarang sudah membangun banyak kios di pusat pertokoan yang lebih teratur dan terorganisir. Berdasarkan arsip foto yang ada maka kita dapat melihat perbedaan kehidupan masyarakat pada masa lalu dengan masa



Instruksi kepada Letnan Ajudan 2 Knoerle untuk membawa P. Diponegoro ke Manado sebagai tempat pembuangannya. ANRI, Bt 30-4-1830 No. 1.



Penjual jamu sehat di pinggir jalan.
ANRI, Kempen RI Jkt No. 2-10-2

sekarang, kemudian kita kembangkan dalam suatu kreatifitas yang cerdas melalui penulisan buku.

Penjual jamu memang tetap ada namun ide kreatif yang dikembangkan pengusaha adalah dengan mendirikan pabrik jamu seperti Sido Muncul. Mereka juga memanfaatkan para penjual jamu untuk memasarkan jamunya baik melalui tukang jamu gendongan maupun pedagang jamu yang membuka kiosnya. Para pengusaha jamu juga memberikan diskon atau fasilitas menarik seperti pulang kampung bersama secara gratis menggunakan bus yang telah disediakan. Untuk memasarkan produknya maka dibuatlah promosi dalam bentuk film berdurasi mini yang menggunakan tokoh panutan atau aktor berbadan tegap. Semua ide ekonomi kreatif ini terekam dalam arsip film dan sangat berguna untuk generasi muda atau masyarakat yang ingin mengetahui sejarah tentang jamu.

Mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan sumber arsip memang layak untuk disebarluaskan. Hal ini disebabkan antara lain Indonesia menyimpan banyak potensi produk

dipadu dengan cara modern, cara-cara memasak sehingga menghasilkan kuliner unik yang diramu dari bumbu-bumbu campuran, dan masih banyak lagi kreatifitas yang bisa dihasilkan serta diakui oleh dunia. Melalui arsip pula banyak tercipta berbagai produk kreatifitas atau Ekonomi Kreatif seperti program Nawa Cita Presiden Joko Widodo.

Arsip adalah harta yang tak ternilai harganya karena jika arsip itu hilang maka kita tidak akan mendapatkan cerita yang utuh. Cerita sepotong yang diperoleh dari arsip yang tidak lengkap, ibarat tentara tanpa senjata atau penulis tanpa pena. Oleh karena itu arsip harus dimanfaatkan, dirawat, dan dilestarikan dengan penuh



Penjual emas di pinggir jalan di Makasar.
ANRI, RVD SulSel No. A 16243

kreatif yang terekam di dalam arsip foto, film, kertas, video, mulai sejak masa kolonial hingga sekarang. Melalui arsip kita bisa menggali lebih dalam potensi yang Indonesia miliki karena di dalam arsip terdapat banyak hal yang sepertinya kecil, tidak berarti, namun penting diungkapkan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat. Melalui arsip sebagai sumber primer kita dapat mempelajari cara-cara beternak secara tradisional

perhatian. Jangan sampai generasi muda tidak kenal sejarah karena arsip yang terlantar, rusak atau hilang. Mensosialisasikan arsip sebagai sumber informasi untuk menciptakan kreatifitas akan membuat masyarakat sadar betapa pentingnya arsip. Mereka tidak lagi akan berfikir bahwa arsip hanyalah seonggok kertas usang yang tempatnya di gudang sehingga tidak menarik untuk dilirik apalagi dibaca.

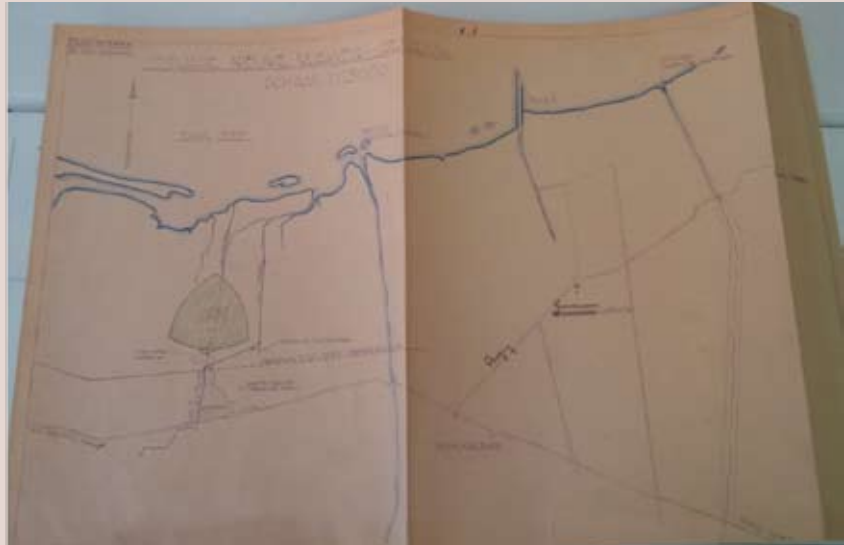
Mochammad Satrianto :

PEMBANGUNAN TERPADU MASA HINDIA-BELANDA MELALUI KHAZANAH ARSIP *BOW* DAN *V EN W*

Belajar dari sejarah” mungkin bisa menjadi ungkapan yang tepat untuk melihat bagaimana pembangunan infrastruktur saat ini dengan ketika pemerintah kolonial melakukannya di masa lampau. Tidak kurang dari Rp 290 triliun dianggarkan dalam APBN-P 2015 untuk belanja Infrastruktur, suatu jumlah yang lebih besar. Anggaran tersebut direncanakan untuk membangun Bendungan, irigasi, Pipa gas, rel kereta api, pelabuhan, bandara, jalan tol dan perumahan. (Kompas, 23/2/2015).

Pembangunan tersebut diharapkan membawa dampak secara ekonomi yang luas dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat. Tersedianya infrastruktur yang baik dan mencukupi memang sangat penting terutama bagi kesejahteraan. Hal inilah yang dahulu juga telah diupayakan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan pembangunan infrastruktur. Apa yang telah mereka bangun dahulu mungkin saat ini masih kita saksikan dan manfaatkan. Banyak hal telah dibangun dan direncanakan oleh pemerintah kolonial ketika itu, bandara, pelabuhan, jalan raya, jalan kereta api, bendungan dan lain sebagainya. Tidak ada salahnya jika kita mau belajar dan meniru apa yang telah mereka lakukan.

Kesadaran akan pentingnya infrastruktur yang baik dan saling menunjang ini diwujudkan oleh pemerintah kolonial dengan membentuk lembaga yang mengurus masalah infrastruktur pada masa



Peta lokasi bandara Kali Banteng, Semarang (Grote Bundel V en W No. Inv. 6266)



Peta lokasi bandara Kali Banteng, Semarang (Grote Bundel V en W No. Inv. 6266)

Hindia Belanda yaitu *BOW* (*Burgerlijke Openbare Werken*) dan *V en W* (*Verkeer en Waterstaat*). *BOW*—yang kemudian pada masanya berganti nama menjadi *VenW*—merupakan

cikal bakal dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Memperhatikan isi dari arsip-arsip *BOW* dan *V en W* maka kita dapat melihat masa kini atau membandingkannya. Banyak dari isinya yang terkait masa kini atau masa kini yang mengacu pada masa lampau. *BOW* dan *V en W* secara terjemahan bebas adalah Departemen Pekerjaan Umum dan Urusan Lalulintas dan Pengairan. Dari nama tersebut dan tugas-tugasnya dapat terlihat tidak jauh berbeda dengan kementerian pekerjaan umum saat ini, yaitu mengurus berbagai pekerjaan infrastruktur umum, jalan raya atau lalulintas dan pengairan atau irigasi.

Organisasi *BOW/V en W* membagi berbagai tugas dan tanggungjawab mereka dalam berbagai bagian atau *afdeeling*. Urusan-urusan tersebut

yang terkait langsung dengan infrastruktur antara lain mengenai bangunan (afdeling A), mulai dari rumah, gedung-gedung instansi pemerintah, penjara, rumah sakit, sekolah, kantor pos dan sebagainya. Selain bangunan ada urusan jembatan dan jalan (Afdeling B), lapangan terbang (Afdeling BL), pengairan dan irigasi (Afdeling E), Pelabuhan (Afdeling H) dan sebagainya.

Pada arsip BOW terdapat Rubrik BL (*Bureau Luchtvaart*) yang mengurus permasalahan lapangan terbang. Lapangan terbang yang menjadi urusannya adalah seluruh lapangan terbang dari Sabang sampai Merauke. Beberapa diantaranya sudah kita kenal, misalnya di Bandung, Kemayoran, Semarang, Yogyakarta.

Sebuah situs berita *online* mewartakan bahwa pemerintah berencana mengembangkan jaringan kereta api yang tersambung dengan bandara dan akan ada 13 bandara yang bakal tersambung dengan jaringan kereta api yang ditargetkan rampung pada 2019. (<http://finance.detik.com/read/2015/03/09/161231/2853520/4/13-bandara-ri-akan-dilengkapi-jalur-kereta-di-2019>). Ketika kita ramai membicarakan integrasi transportasi udara dengan kereta api, seperti apa yang sudah dibuat di bandara Kualanamu Sumatera Utara dan sedang dibuat di bandara Soekarno-Hatta dan sebagaimana warta *online* dimaksud, mungkin kita sedang mengulang sejarah masa lalu yang dibuat oleh pemerintah kolonial.

Pemerintah Kolonial secara tidak langsung telah mencontohkan tentang hal itu. Tengoklah eks bandara Kemayoran yang terletak tidak jauh dari jalur kereta api, Stasiun Kemayoran dan Stasiun Pasar Senen, bandara Hussein Sastranegara dengan Halte Kereta api Andir di Bandung. Demikian juga bandara Adi Sucipto di Yogyakarta yang masih berhubungan baik



Peta Lokasi Rencana Bandara Kemayoran (Grote Bundel V en W No. Inv. 2750)

dengan stasiun KA Maguwo—semula juga digunakan untuk nama bandara dimaksud—dan masih aktif.

Contoh dalam arsip mengenai itu mungkin dapat kita lihat pada arsip mengenai bandara Maguwo (Adi Sucipto, Yogyakarta) yang tergambar dari peta atau cetak biru memperlihatkan bandara yang berdekatan dengan jalur kereta api (Grote bundel V en W No. Inv. 5973). Pada arsip itu ada disebutkan “*Het onderwerpelijke vliegveld ligt aan de Spoorlijn Djokja-Solo, tegenover de N.I.S. halte Magoewo ±10km van de hoofdplaats...*”. Dapat tergambar bahwa lokasi bandara tidak jauh dari ibukota dan tidak jauh dari jalur kereta api sehingga dapat terhubung dengan transportasi kereta api yang terlebih dulu ada. Dengan demikian dapat dilihat adanya upaya integrasi antar moda transportasi dari infrastruktur yang mereka bangun.

Arsip pembangunan lapangan terbang Kali Banteng (Sekarang Bandara Ahmad Yani, Semarang) yang ada pada Grote bundel V en W No. Inv. 230 juga bisa dapat menjadi contoh. Arsip berisikan pembangunan lapangan terbang Kali Banteng sejak pemilihan lokasinya. Dalam bundel terdapat surat bernomor A15/7/4-1936 dari pemerintah provinsi yang antara lain menyebutkan pentingnya lokasi dimaksud terkait ibukota Semarang, pelabuhan dan jalur kereta api, “*Dit vliegveld zou nog aan merklijk dichtter bij het Centrum der stad Semarang gelegen zijn dan wanneer het land Kali Banteng werd gekozen, terwijl ook de onmiddelijke nabijheid van de haven en van het N.I.S Station Tawang van groot belang zijn.*”.

Pada bundel yang sama, Surat bernomor A15/7/20-1936 dari dinas pengairan Provinsi menyinggung

KHAZANAH

tentang kondisi sekitar lokasi akan dibangunnya lapangan terbang Kali Banteng dan koordinasi pekerjaan yang mungkin dapat mengganggu infrastruktur yang telah ada. *"Ik vestig u aandacht op de aanwezigheid van een telegraaf route met ... draden langs de noordzijde van de S.C.S baan en een telefoon route met 18 draden van de gouvernements telefoon en 4 van de S.C.S langs de zuidzijde. Wanneer het vliegveld dicht bij de spoorweg komt zullen deze leidingen wellicht verplaats moeten worden."* Dapat kita ambil pelajaran dari sini adalah mengenai lokasi bandara yang strategis dekat dengan jalur kereta api dan dapat terhubung dengan telepon/telegraf yang telah ada serta koordinasi antar instansi pada suatu kegiatan pembangunan.

Harian Kompas pada 21 Februari 2015 memberitakan rencana pengaktifan kembali jalur kereta api menuju pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang telah sekian lama tidak dimanfaatkan. Dari hal ini kita dapat melihat bahwa sesungguhnya kolonial Hindia Belanda telah mewariskan transportasi kereta api yang penting bagi sarana pengangkutan barang, tidak dengan memanfaatkan truk. Upaya kita saat ini untuk membuat pelabuhan terhubung dengan kereta api mungkin sejatinya hanya mengulang sejarah atau pondasi yang diwariskan oleh pemerintah kolonial di abad 19/awal abad 20. Hal mana bisa dilihat pada peta kota Semarang yang juga terdapat pada Arsip grote Bundel V en W No. Inv. 230 yang menunjukkan jalur kereta api yang telah terhubung dengan pelabuhan.

Terkait irigasi dan pengairan kita dapat belajar kepada rubrik E pada arsip BOW/V en W yang mengelola urusan irigasi dan pengairan. Urusan pengairan kini pun jika dilihat kebelakang kita juga mewariskan pondasi yang telah dibuat pemerintah



Foto Udara Lokasi rencana Bandara Kemayoran, terlihat Jalur kereta api di dekatnya. (Grote Bundel V en W No. Inv. 2750).

kolonial. Tengoklah kementerian PU yang memiliki Balai Besar Wilayah Sungai di beberapa wilayah dapatlah disandingkan dengan yang pernah ada pada masa kolonial. Contoh adanya Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung, Brantas, Serayu, Bengawan Solo. Pemerintah kolonial ketika itu sudah membuat *Irrigatieafdeeling* Tjimanoeck, Brantas, Serajoe, dan *Solovallei werken*. Selain peninggalan organisasi, pada afdeling E bisa menjadi pelajar dalam pengelolaan wilayah sungai saat ini, karena afdeling ini bertanggungjawab dalam pengelolaan sungai, pengairan dan irigasi/bendungan. Melalui arsip BOW/ V en W *Irrigatieafdeeling* Tjimanoeck mungkin kita dapat belajar bagaimana pemerintah kolonial "mengelola" sungai Cimanuk, sehingga musibah banjir yang melanda wilayah pantura Indramayu beberapa waktu lalu akibat jebolnya tanggul sungai Cimanuk kelak tidak terulang kembali.

Penjajahan pemerintah kolonial Belanda mungkin telah meninggalkan luka bagi kita sebagai bangsa, namun tidak berarti kita melupakan dan membuang apa yang telah mereka buat

dan wariskan, karena yang mereka lakukan kitalah yang melaksanakan, mereka merencanakan dan mengorganisasi pembangunannya. Kita pun hingga kini masih banyak memanfaatkan apa yang telah mereka wariskan, bahkan mungkin belum membuat lebih banyak atau lebih baik dari itu. Tak ada salahnya kita tidak hapuskan jejak mereka sepanjang itu positif dan baik serta dapat menjadi pelajaran bagi bangsa kita.

Warisan infrastruktur dan arsip kolonial Belanda yang terkait yang kita miliki dapatlah kita gunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Ini juga berarti kita tidak melupakan perjuangan para pahlawan kemerdekaan yang dahulu berjuang melawan pemerintah kolonial. Arsip tidaklah berkata-kata dan berbicara, ia hanya sekedar catatan dan rekaman atas apa yang telah dikerjakan/ dibuat, namun kitalah yang dapat membuatnya jadi bermakna.



Rina Rakhmawati :

TANTANGAN TEKNOLOGI MEDIA SOSIAL DALAM DUNIA KEARSIPAN

Beberapa waktu lalu, harian Kompas menyorot peran sosial media sebagai kekuatan baru yang mempengaruhi proses bernegara. Penggunaan sosial media dalam bidang politik pemerintahan mulai marak setelah fenomena akun @TrioMacan2000 dengan berbagai informasi “dibalik layar” proses politik yang terjadi di Indonesia. Jelang pemilihan umum anggota legislatif hingga pemilihan presiden/wakil presiden, sosial media menjadi arena baru dalam berkampanye. Hingga pada tahun 2012, muncul petisi elektronik yang diprakarsai oleh Change.org. Laman petisi elektronik tersebut terhubung dengan beragam sosial media sehingga efektivitas petisi menjadi lebih maksimal. Salah satu petisi yang mendapat respon

pemerintah pusat adalah program blusukan asap di Riau.

Ketangguhan sosial media dalam mempengaruhi masyarakat Indonesia pun mulai banyak dimanfaatkan oleh sebagian besar lembaga pemerintah untuk melakukan sosialisasi program-programnya. Di bidang kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) maupun beberapa lembaga kearsipan di tingkat daerah mulai memasuki ranah media sosial. Kebijakan tersebut dinilai dapat mendekatkan kearsipan dengan masyarakat Indonesia, sebagai pengguna media sosial terbesar di dunia. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan peluang menyadarkan masyarakat akan pentingnya arsip dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun demikian, sosial media pun memiliki eksekusi negatif. Dalam salah satu ulasannya, harian Kompas mengatakan bahwa pengetahuan masyarakat Indonesia tentang perkembangan dan etika penggunaan media sosial masih belum memadai. Hal ini berakibat pada pemanfaatan teknologi media sosial yang tidak produktif, bahkan rawan terjerat pidana. Tulisan ini tidak hanya menyorot penggunaan media sosial bagi kearsipan, tetapi juga melihat tantangan yang dihadapi bidang kearsipan di era media sosial.

Dinamika Media Sosial

Media sosial berkembang seiring dengan merebaknya penggunaan jaringan internet berbasis Web 2.0. Fungsi utama media sosial pun kerap

VARIA

bergeser menyesuaikan pertumbuhan perangkat teknologi. Safko dan Len (2009) mendefinisikan media sosial sebagai kegiatan, kebiasaan dan perilaku yang terjadi di antara komunitas orang-orang yang berkumpul secara online dengan tujuan untuk membagi informasi, pengetahuan serta opini menggunakan media percakapan. Dari perspektif sosiologi, media sosial dapat diartikan sebagai komoditi yang diproduksi secara kolektif oleh aksi kolektif yang dimediasi oleh teknologi komputer. Media sosial berkembang seiring dengan teknologi internet yang disebut dengan web 2.0. Alasan utama mengapa media sosial berkembang begitu cepat adalah karena media sosial memudahkan pengguna untuk mencerna informasi yang datang (Qualman, 2009). Safko dan Len dalam Mohammad Fardani Dzulhikam membagi tiga periode kemunculan berbagai media sosial:

Pertama, dekade 90-an, para penyedia jasa layanan internet mengembangkan situs yang memungkinkan pengguna secara online, membuka kemungkinan mengelola situs yang telah dibuat pengguna secara mandiri dan mengenalkan layanan surat elektronik (surel). Pada tahun 1996, *instant messaging* ICQ diluncurkan. Ia menjadi platform dasar aplikasi-aplikasi berformat mikro, seperti Twitter. Berselang satu tahun, yaitu 1997, SixDegrees.com diluncurkan menggunakan model bisnis Jaringan Kontak sehingga memungkinkan pengguna untuk membuat sebuah profil dan berhubungan dengan teman dan keluarga.

Kedua, periode 2000-2009, situs-situs media sosial mulai menjamur, seperti Friendster, MySpace dan

Facebook. Pada periode ini, pengguna lebih dibebaskan dalam pengaturan situs tanpa campur tangan pihak pengelola situs. Dengan membatasi 140 karakter, twitter memosisikan dirinya sebagai media mikroblogging untuk menyiarkan konten.

Ketiga, periode setelah 2010 ditandai dengan bergesernya pola pikir media sosial dari yang sebelumnya media untuk mengutarakan pendapat menjadi media untuk menginformasikan apa yang terjadi saat ini.

Mohammad Fardani Dzulhikam membagi 15 kategori media sosial, yaitu:

Pertama, jejaring sosial,

jenis kategori media sosial yang memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi dalam jaringannya dengan mempublikasikan konten atau tautan yang berhubungan dengan minat dan keahlian penggunanya, misalnya facebook;

Kedua, penyiaran, memfasilitasi kampanye surat elektronik, blogging dan wiki atau bahkan perangkat yang dapat mengatur konten online termasuk dalam kategori ini, misalnya blogger, joomla, wikipedia;

Ketiga, berbagi foto, memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola dan membagikan foto-fotonya dengan pengguna lain, contoh: flickr, picasa dan instagram;



Praktik jual beli arsip di media sosial (Gbr.1)

Keempat, suara, memungkinkan pengguna untuk mengunduh dan membawa ribuan jam lagu, podcast, dan program lainnya dalam sebuah perangkat bergerak, contoh: iTunes, Podbean;

Kelima, video, mengakses konten, merekam, berbagi momen dan peristiwa dengan pengguna lainnya, misalnya: youtube, google video;

Keenam, microblogging, pengguna yang ingin berkomunikasi secara singkat mengenai sesuatu hal yang penting atau bermakna, misalnya twitter, pluk;

Ketujuh, livecasting, untuk streaming siaran langsung, melibatkan penonton untuk mendidik atau menghibur mereka, misalnya Live 365, shoutcast;

Kedelapan, dunia virtual, memungkinkan untuk menjadi seseorang atau sesuatu yang lain dalam berinteraksi dengan pengguna lain di suatu komunitas virtual, misalnya kaneva, second life;

Kesembilan, permainan; Kesepuluh, Aplikasi pendukung produktivitas, contoh: Google Docs, Google Alert. Kesebelas, aggregators, membantu dalam mengumpulkan, memperbarui, dan menyimpan informasi untuk kemudahan akses selanjutnya, misalnya Digg, Google Reader;

Kedua belas, RSS (Rich Site Summary), secara otomatis menyajikan konten terbaru dari situs untuk kebutuhan pengguna, misalnya FeedBurner, RSS 2.0. Ketiga belas, mesin pencari. Keempat belas, perangkat bergerak, misalnya AOL Mobile, Brightkite. Kelima belas, aplikasi antar personal, memudahkan



Praktik jual beli arsip di media sosial (Gbr.2)

pengguna dalam berkomunikasi dan berkolaborasi orang ke orang, contoh: Skype, Go To Meeting.

Penggunaan media sosial mulai banyak merambah di lingkungan pemerintahan. Banyak institusi pemerintah yang mulai memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi publik. Hal ini juga berkaitan dengan tuntutan transparansi yang lebih besar sebagai implikasi penetapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kearsipan di Era Media Sosial

Pasca reformasi, tuntutan masyarakat agar pemerintah lebih transparan dan terbuka dalam hal kinerja dan produk kebijakan yang dihasilkan semakin meningkat. Transparansi menjadi salah satu prasyarat mutlak terwujudnya good governance. Selain melalui website resmi organisasi, beberapa instansi pemerintah menggunakan media sosial, baik berupa jejaring, suara, foto hingga microblogging untuk berbagi informasi publik.

Di bidang kearsipan, peran media sosial pun memiliki andil cukup besar, utamanya memperkenalkan apa dan bagaimana kearsipan di tengah masyarakat. Adanya media sosial, utamanya jejaring sosial, memaksa lembaga kearsipan untuk bergerak lebih lincah mendekati masyarakat dengan berbagai ragam informasi berupa status, foto hingga video youtube. Tidak sedikit pula praktisi kearsipan yang memanfaatkan sisi positif dari media sosial untuk mengenalkan kegiatan profesi arsiparis dan pengelola arsip, beserta hasil pengolahan arsip yang mereka lakukan.

Namun demikian, jika ditelusuri lebih teliti, tidak sedikit pengguna media sosial yang menyebarkan data dan informasi yang diragukan validitas dan orisinalitasnya. Apa yang dilakukan Jonru hanya sebagian kecil dari penyebaran informasi dengan dasar yang tidak begitu kuat. Harian Kompas menyebutkan bahwa pengetahuan masyarakat Indonesia tentang perkembangan dan etika penggunaan media sosial masih belum memadai. Persebaran data maupun informasi yang diragukan, sebetulnya dapat diminimalisasi melalui pengetahuan dan pemahaman yang tepat terhadap pengelolaan arsip. Dalam bidang kearsipan, informasi dipilah pilih sehingga hanya informasi yang memiliki kekuatan validitas dan orisinalitaslah yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna.

Selain tantangan dalam hal sosialisasi kearsipan dan penyaringan terhadap persebaran informasi di media sosial, fenomena jual beli juga marak ditemukan di jejaring media sosial, utamanya facebook. Jual beli dokumen arsip di zaman

media sosial tidak lagi dilakukan secara tersembunyi, meski diperlukan kejelian untuk dapat menemukan lapak online-nya. Jual beli arsip yang bukan menjadi hak milik pencipta arsip dapat dikenakan pasal-pasal pidana dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yaitu:

Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan/atau memiliki arsip negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Setiap orang yang memperjualbelikan atau menyerahkan arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan kepada pihak lain di luar yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hasil pengamatan penulis, dokumen arsip yang diperjualbelikan didominasi dokumen pertanahan hingga dokumen laporan keuangan, salah satunya laporan keuangan pabrik gula. Dokumen tersebut tidak hanya memiliki nilai kesejarahan dalam bidang agraria nasional, namun juga menyimpan hak-hak keperdataan masyarakat. Apabila dapat diperjual belikan dengan bebas, maka kemungkinan terjadinya ketimpangan dalam proses pembuatan kebijakan agraria nasional semakin tinggi.

Catatan Akhir

“Internet sejatinya sebuah senjata”, demikian Harian Kompas membuat

perumpamaan terhadap media sosial. Senjata tentu memiliki dampak positif dan negatif, bergantung pada pengguna atau pemiliknya. Media sosial dapat menjadi senjata efektif dan efisien dalam mensosialisasikan segala sesuatu tentang kearsipan kepada masyarakat awam. Ia juga menjadi sarana ampuh mendekati lembaga kearsipan kepada publik tentang fungsi dan perannya dalam membantu masyarakat mengelola arsipnya.

Namun demikian, media sosial pun memiliki efek negatif yang mampu lebih memarjinalkan dokumen-dokumen bersejarah melalui jual beli ilegal. Kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli dokumen melalui media sosial, utamanya jejaring sosial, akan menimbulkan persepsi buruk. Salah satunya adalah masyarakat awam akan memandang bahwa dokumen bersejarah tidak memberi manfaat dalam menunjang aktivitas harian mereka, sehingga dapat dengan mudah dijual. Persepsi tersebut dapat berakibat pada ketidak-tahuan masyarakat terhadap hak-hak perdata yang tersimpan dalam dokumen arsip.

Tantangan media sosial seharusnya menjadi pekerjaan rumah yang menarik, utamanya bagi lembaga-lembaga kearsipan agar lebih meningkatkan citra kearsipan di mata publik. Media sosial tidak hanya menjadi sarana sosialisasi, tetapi juga senjata investigasi untuk meminimalisasi penyalah-gunaan dokumen arsip sehingga informasi yang tersebar di masyarakat dapat lebih dipertanggungjawabkan.

Parno Nusantara :

DIGITALISASI & METADATA ARSIP *DAGREGISTER* OLEH CORTS FOUNDATION DI ANRI

Dagregister Kastil Batavia merupakan sumber informasi terbanyak dan paling ringkas terkait sejarah kepulauan Indonesia, serta kawasan Asia Tenggara pada umumnya. Arsip yang meliputi kurun waktu 184 tahun ini menyajikan rangkaian data secara sistematis yang tidak dapat ditemukan di tempat lain, terkait kegiatan pelayaran serta aktivitas perdagangan antara Eropa dan Asia, antar Asia dan antar kepulauan nusantara. Arsip ini merujuk pada ribuan surat yang diterima dan dikirimkan selama kurun waktu tersebut. Bagi para sejarawan, salah satu aspek penting dagregister tersebut adalah bahwa didalam arsip ini terdapat lebih dari dua ribu surat diplomatik yang dikirimkan para penguasa Asia Tenggara ketika itu kepada Pemerintah Agung di Kastil Batavia, serta surat-surat jawaban yang bersangkutan. Berdasarkan Inventaris baru tahun 2007 dengan Penerbit Brill di Leiden, Arsip DagRegister yang ada di Arsip Nasional Republik Indonesia

terdiri dari 165 jilid terkait kurun waktu 1640-1806.

Kegiatan preservasi arsip dilakukan melihat kondisi arsip *DagRegister* yang tidak selalu dapat dibaca dengan mudah akibat umur, pelapukan, gerogotan tinta, gerusan kadar asam, pengubahan warna kertas menjadi cokelat serta tulisan memudar atau pemudaran. Dari masa ke masa, preservasi arsip pun dilakukan, Seperti halnya oleh kepala Arsip Negara pada abad kesembilan belas (*Landsarchief* yang kemudian menjadi ANRI), J.A. Van der Chijs yang mengambil prakarsa di tahun 1886 untuk mulai penerbitan *DagRegister*. Kemudian Dra. Soemartini (Kepala ANRI Tahun 1972-1991) melanjutkan preservasi arsip *Dagregister* tersebut melalui kegiatan restorasi (laminasi serta penjilidan ulang) supaya fisik arsip lebih tahan lama. Seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan akses akan informasi arsip yang tersimpan dalam arsip DagRegister dan sebagai upaya Pelestarian dan Penyelamatan

Informasi arsip sebagaimana amanat UU No.43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan maka dilakukanlah kegiatan Reproduksi.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis disebutkan bahwa Reproduksi merupakan bagian dari tindakan preservasi preventif yaitu melakukan penggandaan arsip kedalam satu jenis atau media yang sama dengan cara alih media ke media yang berbeda. Salah satu cara alihmedia tersebut melalui kegiatan digitalisasi. Digitalisasi adalah proses alih media dari bentuk tercetak baik berupa dokumen /arsip maupun audio dan video menjadi format/bentuk digital.

Salah satu kebijakan preservasi arsip statis berdasarkan Perka ANRI tersebut adalah melalui kerjasama dimana dijelaskan bahwa Lembaga kearsipan melakukan hubungan kerjasama dengan institusi dan



Proses digitalisasi

organisasi lain dalam rangka memenuhi kebutuhan preservasi arsip statis baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Yayasan Corts (The Corts Foundation – TCF) mulai mengembangkan sebuah Proyek Sejarah Digital di awal 2010. Yayasan Corts merupakan sebuah organisasi non-pemerintah Belanda di bidang warisan kebudayaan. Dalam tahun yang sama, pemerintah Indonesia mengakui TCF sebagai sebuah Organisasi Non-pemerintah Internasional (INGO) dan memberi izin kepada yayasan itu untuk berkiprah di Indonesia. Sesudah terdaftar sebagai sebuah INGO, ANRI dan TCF menandatangani sebuah *Memorandum of Understanding (MoU)* pada tanggal 18 Mei 2011. Kedua

pihak sepakat untuk memulai program digitalisasi dan akses publik khususnya pada arsip VOC yang sudah rentan. Nama proyek untuk pengembangan teknologi adalah DASA (*Digital Archives Systems at ANRI*) dimana Salah satu khasanah VOC yang didigitalisasi adalah *Dagregister*.

Teknis Digitalisasi Arsip DagRegister

Kegiatan teknis digitalisasi arsip *Dagregister* dilakukan oleh sebuah tim digitalisasi yang terdiri dari tim konten, tim pemindaian dan tim akses. Setiap tim mempunyai tugas pekerjaan yang berbeda dan menjadi satu mata rantai kegiatan digitalisasi. Kegiatan teknis yang meliputi tim konten dan tim pemindaian sampai dengan server storage dapat dilihat pada gambar

alur proses digitalisasi sedangkan tim akses sampai dengan publikasi tidak diulas pada tulisan ini.

Adapun teknis digitalisasi arsip *Dagregister* adalah sebagai berikut, pertama arsip *Dagregister* yang telah diterima Tim Konten dari Depot penyimpanan arsip dilakukan pengecekan kembali serta *Re-numbering content* Arsip tersebut berdasarkan Inventaris. Setelah dilakukan *Re-numbering content*, arsip tersebut diterima oleh Tim Scanning untuk dilakukan pemindaian/scanning. Pemindaian/scanning dilakukan dengan menggunakan Overhead Scanner Zeutschel OS 14000 A1 yang telah dikalibrasi sempurna di pabrik Zeutschel di Tübingen, Jerman. Dengan alat ini diperoleh hasil pemindaian berwarna yang berkualitas

tinggi, hal ini dilakukan dengan bantuan ahli-ahli dari Belanda. Pemindaian/scanning dilakukan sesuai Petunjuk Metaformoze Preservation Imaging Guidelines 1.0 (www.metamorfoze.nl/guidelines. April 2012) sehingga digitalisasi dilakukan sesuai standar mutu terbaik dunia dengan hasil pemindaian bermutu tinggi.

Kedua, sebelum dilakukan pemindaian/scanning, dilakukan kalibrasi terhadap Scanner Zeutschel OS 14000 A1 /A0 melalui Universal Test Target (UTT). Setiap hasil UTT di analisa setiap hari sesuai dengan standar metamorfoze.

Ketiga, setelah Universal Test Target (UTT) sesuai dengan standar metamorfoze maka dilakukan pembuatan data untuk arsip yang akan di pindai/scan melalui software scanner yaitu Omniscan 12.4 SR4 Buid844.

Beberapa hal yang di buat meliputi:

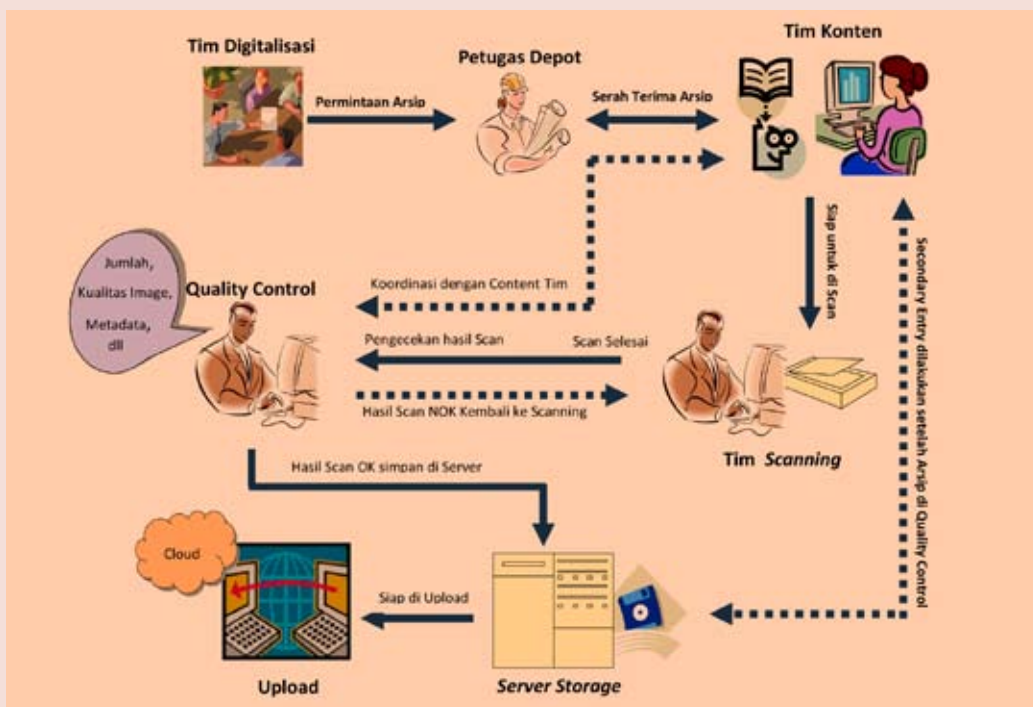
- Folder Penyimpanan Digital
- Nama Kegiatan Digitalisasi, dalam kegiatan *Dagregister* disebut DASA (*Digital Archive Systems* at ANRI)
- Koleksi Arsip yang di scan dan Nomor Jilid Arsip (Nomor Bundel)
- ScanJob
- Format Digital yang dibuat, yang terdiri dari 2 jenis yaitu :

Pertama, TIFF (Tagged Image Format File) untuk keperluan Preservasi. TIFF merupakan format gambar terbaik saat ini dengan pengertian bahwa semua data dan informasi (data RGB, data CMYK, dan lainnya) yang berkaitan dengan koreksi atau manipulasi terhadap gambar tersebut tidak hilang. Format TIFF biasa digunakan untuk kebutuhan pencetakan dengan kualitas gambar yang sangat tinggi sehingga ukuran

berkas untuk format ini biasanya sangat besar, karena dalam file ini gambar tidak dikompresi.

Kedua, JPG / JPEG (Joint Photographic Experts Group) untuk keperluan akses / publikasi. JPG sudah digunakan dan menjadi standar gambar di internet karena bisa dikompresi hingga ukuran kecil. Data JPG tertentu bisa dikompres dengan rasio perbandingan 2:1 bahkan lebih tinggi lagi yaitu 100:1, tergantung pengaturan yang diberikan. Pada saat jaringan internet yang tersedia masih berupa koneksi dial-up, JPG / JPEG adalah satu-satunya jenis data yang bisa dikirimkan dan dilihat secara bebas.

Scanner Zeutsel sendiri telah dilengkapi dengan fitur dimana satu kali scanner menghasilkan 2 output format yang berbeda yaitu file TIFF dan JPEG.



Gambar alur proses digitalisasi

Keempat, pemindaian/Scanning mulai dilakukan halaman per halaman setiap jilidnya. Kelima, satu jilid arsip yang telah selesai di pindai/scan kemudian dilakukan *Quality Control* sebelum hasil digital arsip tersebut disimpan sebagai Preservasi maupun dilakukan *Secondary Entry* oleh Tim Content untuk kebutuhan akses/publikasi. *Quality Control* ini meliputi :

- Pengecekan kesesuaian antara jumlah hasil pemindaian/scanning (file digital) dengan fisik arsipnya
- Bila ada halaman yang lewat terpindai (terscan), maka arsip akan dikembalikan kepada petugas pemindai/scanning untuk di lakukan pemindaian folio yang terlewat
- Bila jumlah halaman hasil pemindaian/scanning (file digital) dengan fisik arsipnya sudah sesuai maka dilakukan pengecekan metadata dari hasil digitalisasi tersebut
- Bila terdapat metadata yang tidak sesuai dengan metadata yang diharapkan, maka dikembalikan kepada petugas pemindai/scanning untuk dilakukan re-scanning
- Bila metadata sudah sesuai, maka arsip dengan bentuk file TIFF disimpan sebagai Preservasi Images, sedangkan bentuk file JPG/JPEG siap untuk di Upload untuk keperluan akses / publikasi

Keenam, Arsip digital format file JPG/JPEG yang sudah tersimpan di *cloud/store*, dilakukan pengecekan kembali oleh Tim Content untuk selanjutnya dilakukan *secondary entry* dan sebagai *quality assurance* terakhir sebelum arsip siap di publikasi. Bila ada halaman yang tidak terscan maka akan dikembalikan

kepada Tim Scanning untuk dilakukan pemindaian/scanning ulang

Metadata

Berdasarkan Peraturan Kepala ANRI no 21 Tahun 2011 tentang Standar Elemen Data Arsip dinamis dan Statis untuk penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional disebutkan bahwa Elemen Data merupakan struktur data terkecil dalam suatu sistem pengolahan data yang memiliki makna atau semantik tertentu. Standar elemen data arsip adalah penetapan nama elemen data arsip yang ada dalam suatu sistem kearsipan dalam rangka menjangkau metadata kearsipan khususnya metadata untuk mendeskripsikan sumber (arsip).

Metadata kearsipan adalah informasi yang membantu agar arsip dapat dengan mudah diidentifikasi dan diakses, disamping juga memungkinkan arsip dapat dikelola secara efektif dan efisien.

Beberapa contoh kegunaan metadata pada arsip, diantaranya:

- Untuk membandingkan dua buah arsip yang diambil dengan pengaturan yang berbeda, kemudian dilihat perbedaan hasilnya sehingga bisa diperoleh pengaturan yang lebih baik
- Untuk mengetahui siapa pencipta arsip digital tersebut, dan sebagainya

Metadata yang tercipta pada Digitalisasi Arsip *Dagregister* dimulai pada saat arsip akan dilakukan pemindaian/scanning. Metadata yang tercipta bisa dilihat dengan aplikasi EXIF Data. Pada dasarnya metadata

adalah istilah dalam dunia teknologi informasi, yang kurang lebih berarti data yang merekam informasi penting mengenai sebuah file. Sementara EXIF adalah metadata yang khusus dipakai dalam dunia fotografi digital. EXIF adalah sebuah singkatan yang kepanjangannya *Exchangeable Image Format*.

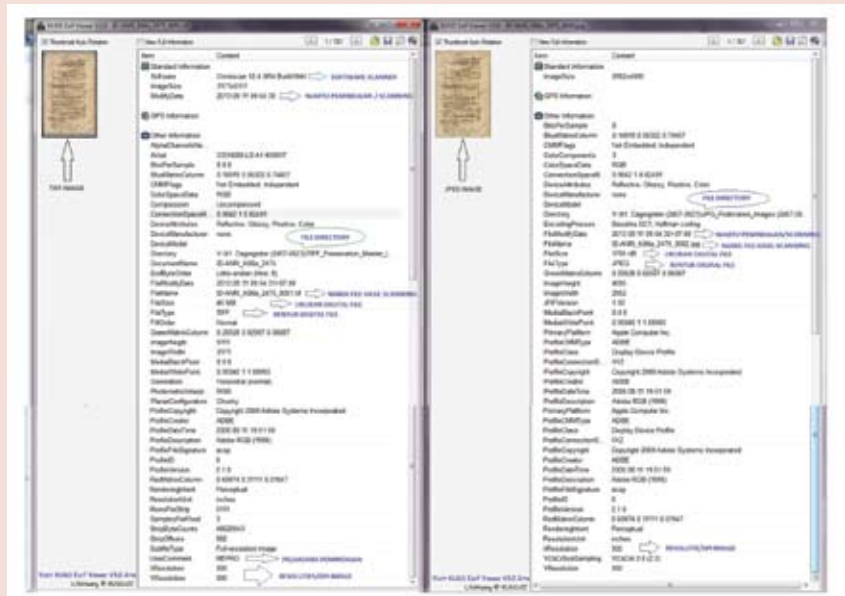
Contoh Metadata yang tercipta pada file digital *Dagregister* dengan Scanner Zeutzel A1/A0 seperti terlihat pada EXIF Viewer di atas. Metadata inilah yang dilakukan pengecekan pada bagian *Qualitycontrol*. file digital yang diambil sebagai contoh adalah *DagRegister HR 2475*. Pada gambar diatas ditampilkan dua format/bentuk file digital yang di hasilkan yaitu TIFF dan JPEG. Format/bentuk file digital TIFF dibuat dengan menambah sedikit ruang kosong di keempat sisi dengan tujuan memperlihatkan bahwa tidak ada bagian dari arsip yang hilang pada saat dilakukan digitalisasi, sementara file format/bentuk digital JPEG/JPG dibuat menyesuaikan dengan ukuran dari arsip tersebut.

Dari sekian banyak metadata yang tercipta, beberapa hal yang bisa dilihat secara umum meliputi :

- Software Scanner yang digunakan adalah Omniscan 12.4 SR4 Build1844 yang merupakan aplikasi yang terintegrasi dengan Scanner Zeutzel A1/A0
- Waktu pemindaian/scanning yaitu 2013.09.11 09:54:30. Hal tersebut menginformasikan bahwa arsip digital ini tercipta pada tanggal 11 September 2013 pukul 09:54:30. Baik pada file TIFF maupun file JPG/JPEG, keduanya tercipta pada waktu

yang sama dikarenakan pemindaian/scanning dilakukan pada waktu yang sama tetapi dengan 2 output format yang berbeda

- **File Directory** (Folder Penyimpanan) yaitu menginformasikan bahwa penyimpanan arsip terdapat pada directory seperti yang tercipta. Y:\01.Dagregister (2457-2623)\TIFF_Preservation_Master untuk file TIFF yang tersimpan sebagai preservasi dan Y:\01.Dagregister (2457-2623)\JPG_Publication_Images sebagai file digital untuk keperluan akses/publikasi. Terdapat pembagian folder penyimpanan antara file digital untuk preservasi dengan file digital untuk keperluan akses / publikasi
- Nama File Hasil pemindaian/scanning yaitu ID-ANRI_K66a_2457_0001.tiff atau ID-ANRI_K66a_2457_0002.jpg. ID-ANRI berarti Arsipnya di Indonesia dan berada di ANRI, K66a merupakan koleksi VOC *Hoge Regering* (sesuai dengan katalog di Ruang Baca), 2547 nama jilid /Bundel dan 001/002 Nomor file digital sedangkan .tiff atau .jpg adalah format digital yang di hasilkan
- Ukuran File Digital; tercatat 46 MB untuk kebutuhan Preservation dan 1795kB untuk keperluan akses atau publikasi. Ukuran file digital masih bisa dikompresi lebih kecil lagi dengan cara menurunkan resolusi pada pengaturan scanner atau melakukan kompresi setelah JPEG/JPG dihasilkan tergantung kebutuhan dari publikasi
- Bentuk File Digital, file TIFF merupakan format digital untuk pelestarian informasi (preservasi) dan file JPG/JPEG untuk keperluan akses atau publikasi.



Contoh Metadata pada arsip *Dagregister* HR 2475

- Pelaksana pemindaian/scanning; yaitu sesuai pada saat pembuatan data sebelum pemindaian/scanning dimulai yaitu tim REPRO dan,
- Resolusi gambar yang di ambil yaitu 300 dpi (*dot per inch*), spesifikasi dpi menunjukkan kerapatan jumlah titik per inci yang dapat dicapai printer dalam bentuk teks atau grafis pada halaman yang dicetak. Semakin tinggi dpi, maka semakin halus teks atau gambar yang tercetak demikian juga bila dpi semakin besar, maka semakin bagus gambar yang dihasilkan. Jika gambar ingin diperbesar, pengaturan dpi tinggi diperlukan. Capaian maximal dpi tergantung pada spesifikasi scanner yang di gunakan

Metadata yang tersimpan pada Arsip *Dagregister* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan Digitalisasi dan merupakan identitas yang menempel dari arsip digital *Dagregister* sehingga informasi tersebut membantu agar arsip

dapat dengan mudah diidentifikasi dan diakses, untuk selanjutnya arsip digital tersebut dapat dikelola secara efektif dan efisien. Digitalisasi diperlukan sebagai salah satu upaya pengamanan informasi yang terkandung dalam arsip, dengan tujuan membuat copy yang dapat berfungsi sebagai preservation copy untuk mengamankan arsip aslinya dan tidak digunakan jika tidak benar-benar di butuhkan, atau sebagai viewing copy atau reference copy di Ruang Layanan informasi maupun sebagai duplicating copy bagi kebutuhan peminat arsip di Layanan informasi (Layanan Ruang Baca) sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis.

Dharwis W.U. Yacob :

SELAMAT DATANG PERMENPAN BARU ! : TANTANGAN DAN IMPLEMENTASI

Profesi Arsiparis tentunya bagi sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum banyak dikenal. Selain itu pula, beberapa pandangan masyarakat Indonesia tentang tugas arsiparis sangatlah minim. Arsiparis, bagi sebagian kecil masyarakat Indonesia yang mengenal istilah arsiparis, memiliki tugas yang membosankan, melelahkan, menakutkan serta memiliki pendapatan dan penghargaan yang tidak sebanding dengan tanggung jawabnya. Sebagian kecil lagi mengasumsikan bahwa tugas arsiparis sangat rumit. Namun, tidak sedikit pula yang merasa senang dan menjadi tertantang dengan tugasnya sebagai seorang arsiparis.

Tentunya sebelum melangkah lebih jauh, definisi arsiparis harus diketahui terlebih dahulu. Definisi arsiparis adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan tugas kearsipan. Selain itu pula arsiparis adalah seseorang pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan lembaga negara, pemerintahan



Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis

daerah, pemerintahan desa dan satuan organisasi perguruan tinggi negeri.

Dari penjelasan diatas, dapat diartikan bahwa arsiparis disandang oleh pegawai negeri sipil. Selain itu pula, arsiparis merupakan salah satu rumpun jabatan fungsional. Jabatan fungsional arsiparis ini setara dengan jabatan fungsional lain seperti guru, peneliti, dosen, atau dokter yang sudah dikenal oleh masyarakat. Tentunya, dikarenakan arsiparis merupakan bagian dari pegawai negeri sipil ini

memiliki aturan-aturan tertentu, maka arsiparis yang berada di lingkungan pegawai negeri sipil ini juga harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam ruang lingkup pegawai negeri sipil. Bahkan sampai istilah pegawai negeri sipil pun telah berubah. Istilah pegawai negeri sipil kini berubah menjadi aparat sipil negara sejak diberlakukannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2014.

Seiring dengan ditetapkannya

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2014 yang mengatur mengenai kedudukan Pegawai Negeri Sipil maka disusunlah pula Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis. Adapun tugas arsiparis sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 48 Tahun 2014 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 adalah melaksanakan kegiatan kearsipan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, dan Perguruan Tinggi Negeri.

Tugas arsiparis tersebut dijabarkan dalam berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 48 Tahun 2014 Bab II Rumpun Jabatan, Kedudukan Jabatan Fungsional Arsiparis Pasal 4 meliputi menjaga terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri kemudian menjaga ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, menjaga terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjaga keamanan dan keselamatan arsip yang berfungsi untuk menjamin arsip-arsip yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya, menjaga keselamatan dan kelestarian arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara, serta menjaga keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan juga menyediakan informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Selain itu, tugas pokok arsiparis berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 48 Tahun 2014 Bab V Tugas Pokok, Hasil Kerja Dan Uraian Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi.

Dari peraturan diatas, terjadi perubahan atas tugas arsiparis yang terjadi selama ini. Selama ini, tugas arsiparis hanya memiliki tugas memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 48 Tahun 2014 Bab V Tugas Pokok, Hasil Kerja Dan Uraian Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis, tugas arsiparis diperluas menjadi pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, serta pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi. Hal ini merupakan perkembangan tugas arsiparis menjadi lebih luas. Sebelumnya, dalam pengelolaan arsip tidak dibedakan antara pengelolaan arsip statis dan pengelolaan arsip dinamis. Padahal secara ilmu kearsipan, mengolah arsip statis dan mengolah

arsip dinamis memiliki pendekatan keilmuan yang berbeda. Dengan dibedakannya pengelolaan arsip menjadi pengelolaan arsip statis dan pengelolaan arsip dinamis akan tercipta arsiparis yang semakin profesional di bidangnya sesuai dengan tugasnya masing-masing baik dalam bidang arsip statis dan bidang arsip dinamis. Ditambahkannya tugas arsiparis yaitu pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi adalah menandakan bahwa tugas arsiparis menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang terjadi sehingga arsiparis tidak menjadi suatu profesi yang ketinggalan zaman. Arsiparis diharapkan sebagai arsiparis yang tidak lekang oleh waktu dan selalu mengikuti perkembangan teknologi seperti sekarang ini dimana teknologi telah memasuki era digital.

Selain itu juga, tugas arsiparis sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 48 Tahun 2014 menjadi jauh lebih berkembang sehingga menuntut arsiparis menjadi sebuah profesi yang benar-benar profesional. Dengan adanya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 48 Tahun 2014 membuat tugas arsiparis Indonesia menuju ke arah era baru yaitu ke arah yang lebih baik. Tentunya dengan ucapan "Selamat Datang Permenpan Baru", semoga arsiparis ke depan menjadi profesi yang lebih baik dan menjadi profesi yang handal tentunya dengan mampu menjawab persoalan dan tantangan di masa depan.

PERINGATAN 100 TAHUN PERANG DUNIA I: ARSIP NEGARA TURKI BERHASIL AKUISISI ARSIP PD I DI DUNIA

Telah seratus tahun lalu Perang Dunia (PD) I meluluhlantakan sebagian bumi Eropa. Perang yang berlangsung sejak 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918 dimenangkan Blok Barat dan berakhir dengan dilaksanakannya gencatan senjata pada 11 November 1918. Pecahnya PD I memberikan berbagai dampak bagi seluruh belahan dunia. Apalagi saat itu banyak negara yang masih belum terbebas dari kolonialisme dan imperialisme yang mana sebagian bangsa Eropa yang melakukan penjajahan juga terlibat di dalam PD I.

Genap seabad, selama tahun 2014-2018 ada berbagai kegiatan dilaksanakan untuk memperingati PD I. Tak lain peringatan ini dilaksanakan untuk semakin mengingatkan berbagai belahan dunia bagaimana dampaknya PD I dan mereka pun dapat mengambil berbagai hikmah dan pelajaran agar jangan lagi sampai tercetus PD III. Termasuk Republik Turki atau *Türkiye Cumhuriyeti* yang juga menjadi salah satu negara yang ikut dalam PD I turut menyelenggarakan kegiatan untuk memperingati seabad PD I. Saat PD I, Turki masih berbentuk kesultanan atau dikenal dengan Kesultanan Utsmaniyah.

Penyelenggaraan kegiatan peringatan seabad PD I di Turki di antaranya dilaksanakan oleh Arsip Negara Turki yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi



Kantor Arsip Negara Turki

Perdana Menteri dengan menggelar kegiatan internasional yakni, *Documents of the First World War Centenary*. Kegiatan ini dapat dikatakan menjadi kegiatan yang dilakukan Arsip Negara Turki untuk mengakuisisi arsip tentang PD I yang berada di negara-negara belahan dunia. Bukan hanya negara yang mengikuti PD I, namun banyak negara yang tidak secara langsung terlibat dalam PD I tetapi memiliki arsip yang berkaitan dengan PD I.

Tingkat perkembangan arsip tentang PD I yang berhasil diakuisi Arsip Negara Turki adalah dalam bentuk

copy. Lalu, bagaimana sebenarnya melalui kegiatan *Documents of the First World War Centenary* Arsip Negara Turki dapat memperoleh copy arsip tentang PD I dari berbagai negara di belahan dunia?

Documents of the First World War Centenary diselenggarakan pada 19 – 24 Maret 2015 di Istanbul, Turki. Kegiatan ini dibuka oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Turki pada 14 Maret 2003 sampai 28 Agustus 2014 dan sebenarnya hampir mirip dengan pelaksanaan simposium. Perwakilan

berbagai negara yang memiliki arsip tentang PD I dalam kesempatan ini menyampaikan makalahnya untuk membahas dan mengupas arsip apa yang dimiliki oleh negaranya dan memiliki keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan PD I. Namun, tentu ada proses panjang yang dilalui dan dilaksanakan untuk menuju ke arah simposium ini.

Arsip Negara Turki memulai kegiatan *Documents of the First World War Centenary* dengan melaksanakan komunikasi pada tahun 2014 kepada Arsip Nasional di negara-negara belahan dunia. Komunikasi yang dilakukan Arsip Negara Turki dilakukan melalui surat undangan Kepala Arsip Negara Turki, Associate Professor Uğur Ünal kepada Arsip Nasional negara lain untuk turut berpartisipasi memperingati Peringatan Seabad PD I. Dalam surat tersebut, Arsip Negara Turki mengajak arsip negara lain untuk membuat makalah tentang hasil riset terhadap arsip yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan PD I. Pada awal tahun 2015, tiap peserta dari berbagai Arsip Nasional di Dunia diharuskan mengirimkan makalahnya kepada Arsip Negara Turki disertai dengan copy arsipnya untuk kemudian diseleksi dan diputuskan layak tidaknya untuk dibahas dan dikupas dalam *Documents of the First World War Centenary*.

Hasilnya, sebanyak 45 negara dinyatakan dapat mempresentasikan makalah tentang hasil riset terhadap arsip yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan PD I pada *Documents of the First World War Centenary*. Negara yang hadir tersebut yakni Turki, Australia, Rusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Indonesia, Estonia, Afrika Selatan, Georgia, Kroasia, India, Italia, Jepang, Kanada, Kazakhstan, Lithuania, Hongaria, Malaysia, Nigeria, Norwegia, Polandia, Bangladesh,



Pemaparan makalah tentang arsip PD I pada kegiatan internasional *Documents of the First World War Centenary* di Istanbul - Turkey, 19-21 Maret 2015

Senegal, Serbia, Slovakia, Sloveni, Jerman, Austria, Belgia, Maroko, Finlandia, Prancis, Belanda, Inggris, Iran, Spanyol, Kenya, Latvia, Libya, Malta, Mongolia, Moldova, Uzbekistan, Rusia, Romania, Tartastan, Tunisia, New Zealand dan Yunani. Bagi perwakilan keempat puluh lima negara yang mempresentasikan makalahnya ini Arsip Negara Turki menjamin seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta, seperti akomodasi, tiket perjalanan dan lain-lain.

Tidak semua dari keempat puluh lima negara tersebut membahas arsip yang berkaitan langsung dengan PD I, seperti halnya Indonesia dan Peru yang dapat menjadi peserta walaupun tidak mengikuti dan memiliki arsip yang berkaitan langsung dengan PD I. Peru saat itu dijajah oleh Spanyol yang juga merupakan negara di bumi Eropa. Indonesia yang dalam hal ini diwakili Kepala Subdirektorat Pemanfaatan Arsip, Senja Kala Yahya berkesempatan untuk mempresentasikan arsip yang berkaitan dengan PD I yang disimpan dan dilestarikan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Dalam makalahnya yang bertajuk *Documents*

of the First World War.

Adapun arsip yang digunakan dan kemudian dikirimkan ke Arsip Negara Turki bersumber pada khazanah ANRI, Algemeene Secretarie – BGS 12 Dec. 1917 no. 2996/II dan Algemeene Secretarie – Bt.GG 11-04-1921 no.29. Berdasarkan arsip tersebut, pada periode PD I, Indonesia yang saat itu dikenal dengan nama Hindia Belanda masih mengalami penjajahan oleh Belanda. Saat itu, Belanda memang tidak ikut serta menjadi negara yang berperang. Tetapi, kisruhnya kondisi di belahan bumi Eropa akhirnya dimanfaatkan oleh putra Indonesia, Abdul Muis yang merupakan wakil dari pimpinan Sarikat Islam untuk melakukan perjalanan ke Belanda dan berorasi. Orasi Abdul Muis diawali di Jenewa. Dalam orasinya, Abdul Muis menyampaikan konsep tentang pertahanan Hindia Belanda yang bertajuk *Stroomingen en Partijen in Oost-Indie* (aliran-aliran dan partai-partai politik di Hindia Belanda). Orasi Abdul Muis pun banyak dipublikasikan dalam berbagai media cetak di Belanda.

MANCA NEGARA

Berdasarkan arsip yang disimpan di ANRI, diceritakan bahwa dalam periode PD I sebetulnya Indonesia memiliki hikmah dan buah manis dari perjalanan Abdul Muis. Saat itu hasil orasinya memanfaatkan politik balas budi yang diterapkan Belanda untuk kemudian ditindaklanjuti dalam sebuah pergerakan. Hasil pergerakan tersebut akhirnya Indonesia dalam hal ini Hindia Belanda mendapat kemajuan, pertama dalam bidang politik berdasarkan konstitusi *Indische Staatsregeling* buatan Belanda pada 18 Mei 1918 Gubernur Jenderal Graaf van Limburg Stirum atas nama pemerintah penjajah Belanda membentuk dan melantik *Volksraad* (Dewan Rakyat) yang secara harafiah berarti “Dewan Rakyat”, yakni semacam dewan perwakilan rakyat Hindia-Belanda. Kedua, dalam bidang pendidikan akhirnya didirikan *Technische Hogeschool* (THS) atau yang saat ini dikenal dengan Institut Teknologi Bandung pada tahun 1920.

Terlepas dari sisi positif yang dialami Indonesia saat periode PD I. Namun, sejatinya PD I lebih banyak memberikan efek negatif, terutama bagi negara yang terlibat langsung dalam PD I beserta negara yang dijajah oleh negara yang ikut serta dalam PD I. Seperti halnya Rusia, Turki, Jerman, Austria dan lain-lain sebagai negara yang turut serta PD I. Banyak arsip yang dimiliki mereka dan menunjukkan bahwa memang PD I itu sangat merugikan. Dalam kesempatan ini, seluruh arsip yang digunakan oleh 45 negara ini oleh Arsip Negara Turki turut juga dipamerkan. Penyelenggaraan pameran dilaksanakan bertepatan dengan pelaksanaan simposium *Documents of the First World War Centenary*.

Melihat kenyataan tersebut, melalui pelaksanaan *Documents of the First World War Centenary*, Arsip Negara Turki berhasil mengakuisisi arsip tentang PD I dari berbagai negara di belahan dunia. Arsip tersebut baik yang berkaitan langsung



Pameran arsip tentang PD I pada kegiatan internasional *Documents of the First World War Centenary*

maupun tidak langsung dengan PD I. Tidaklah berlebihan jika akhirnya Turki nyaris lengkap memiliki arsip tentang PD I. Arsip yang dimilikinya pun telah sesuai dengan kriteria yang diinginkan karena pada tahap awal Arsip Negara Turki melakukan seleksi dan verifikasi terhadap makalah yang dikirimkan.

Kegiatan ini walaupun seperti simposium namun mampu membuahkan hasil yang cukup signifikan, Arsip Negara Turki telah memiliki referensi dan sejarah terjadinya PD I dari berbagai belahan dunia. Pelaksanaan kegiatan ini pun turut diapresiasi oleh Presiden *International Council on Archives*, David Fricker yang dalam sambutan pembukaan rangkaian acara menyatakan bahwa kegiatan ini menjai ide original Turki dalam mengakuisisi arsip dari berbagai belahan dunia dalam suatu kegiatan. Nantinya, arsip yang berhasil diakuisisi Arsip Negara tersebut selain dilestarikan tetapi juga harus dimanfaatkan “sebagai pengingat” yang jujur dan apa adanya dari kejadian masa lalu agar kita dapat mengambil hikmah ataupun pelajaran dari suatu peristiwa, khususnya dalam hal ini PD I. Selain itu, Fricker pun

mengingatkan bahwa sebagai sumber daya manusia kearsipan kita memiliki tugas dan kewajiban bagaimana arsip yang dijaga dan dilestarikan dapat dipublikasikan, dapat diakses dan dimanfaatkan (sumber www.ica.org).

Melihat keberhasilan Arsip Negara Turki dalam mengakuisisi arsip tentang PD I melalui kegiatan *Documents of the First World War Centenary*, lantas timbul pertanyaan, adakah dampak positif bagi Indonesia turut berpartisipasi dalam *Documents of the First World War Centenary*? Partisipasi aktif Indonesia dalam ajang internasional *Documents of the First World War Centenary* tentu memberikan dampak positif, melalui kegiatan ini secara nyata Indonesia dalam hal ini ANRI dapat memperkenalkan kekayaan khazanah arsip ANRI pada awal abad ke-20 yang terpelihara dan aksesibel bagi peneliti arsip dunia. Khususnya, bagi peneliti arsip yang akan menggali tentang situasi politik di Asia, khususnya tentang pergerakan nasional bangsa Indonesia pada masa penjajahan kolonial dari perspektif pemerintahan kolonial Hindia Belanda. (Red TK)



BALE PANYAWANGAN DIORAMA PURWAKARTA: IKONNYA KAD PURWAKARTA

Keberadaban suatu bangsa dapat dilihat dari kesungguhannya untuk menyimpan dan menjaga catatan peristiwa masa lalunya
(H.Dedi Mulyadi/Bupati Purwakarta 2008-2018)

Purwakarta, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, terletak ±80 km sebelah timur Jakarta. Kabupaten Purwakarta berada pada titik-temu tiga koridor utama lalu-lintas yang sangat strategis, yaitu Purwakarta-Jakarta, Purwakarta-Bandung dan Purwakarta-Cirebon.

Selama ini Purwakarta dikenal dengan waduk nya yaitu waduk Jatiluhur dan Cirata. Namun, pada tanggal 28 Februari 2015, Purwakarta mulai tampil beda dengan menambah destinasi pariwisata mereka lewat tiga karakter budaya, yaitu Monumen Citraresmi, Taman Air Mancur terbesar di Indonesia yaitu Sribaduga Situ Beleud, dan Bale Panyawangan Diorama Purwakarta.

Salah satu destinasi nya yaitu Bale Panyawangan Diorama Purwakarta (selanjutnya disingkat BPDP)

merupakan diorama digital pertama di Jawa Barat tentang Tatar Sunda dan Purwakarta yang sebagian besar diambil dari arsip . BPDP ini dibangun dan dikelola oleh KAD Purwakarta. Bahkan telah menjadi ikon baru KAD Purwakarta.

Sekilas Bale Panyawangan Diorama Purwakarta (BPDP)

Prakarsa awal pembangunan diorama ini berasal dari Bupati Purwakarta H Dedi Mulyadi, yang akrab disapa dengan nama Kang dedi. Bupati yang juga budayawan Sunda ini sangat paham sekali akan pentingnya arsip. Ia menganggap arsip sebagai bukti peradaban. Ia tidak ingin arsip hanya dianggap sebagai tumpukan kertas belaka. Namun lebih dari itu, menurut Kang Dedi peranan arsip sebagai bagian penting dalam proses kehidupan berbangsa, bernegara dan

bermasyarakat harus diangkat. Antara lain melalui perpaduan arsip, seni dan teknologi yang diimplementasikan dalam bentuk diorama, yang berisi sejarah Purwakarta dan Tatar Sunda secara keseluruhan. Diorama ini diharapkan dapat memperkenalkan arsip khususnya sejarah dan budaya Sunda kepada masyarakat dengan cara yang menarik dan mudah dipahami.

BPDP tersebut dibangun oleh Tim dari SKPD , ANRI dan Sejarahwan dari Unpad yaitu Prof Nina Lubis dan Prof Sobana Hardjasaputra. Diorama yang dibuat selama 1,5 tahun . Diorama ini mengambil tempat di salah satu gedung kembar (bekas tempat pertemuan orang Belanda tempo dulu). Gedung ini terletak strategis tepat di pintu masuk - keluar stasiun Purwakarta. Selain strategis diorama tersebut juga dikelola secara professional dimana mereka menggunakan pegawai khusus untuk guide dan resepsionis yang diseleksi ketat oleh BKD. Bahkan mereka setiap hari menggunakan



Sepeda onthel menjadi salah satu ikon unik Diorama Purwakarta

pakaian kampret (untuk laki-laki) dan paski (untuk perempuan), dalam rangka melestarikan budaya Sunda.

BPDP mempunyai 9 hall dengan nama raja-raja Sunda yaitu: Pertama, Bale Prabu Maharaja Linggabbhuwana yang menyajikan sejarah tatar sunda. Kedua, Bale Prabu Niskala Wastukencana yang menampilkan *hall of fame* sosok para pemimpin Purwakarta dari masa ke masa.

Ketiga, Bale Prabu Dewaniskala, menggambarkan Purwakarta pada masa pengaruh Mataram dan VOC dengan rentang waktu tahun 1620-1799. Keempat, Bale Prabu Ningratwangi, menyajikan Purwakarta pada masa Hindia Belanda 1800-1942.

Kelima, Bale Prabu Jayaningrat, menampilkan gambaran Purwakarta pada masa pergerakan nasional dan masa pendudukan Jepang. Keenam, Bale Prabu Dewata menyajikan keadaan Purwakarta pada masa

kemerdekaan dan masa revolusi 1945-1950 serta masa demokrasi liberal 1950-1959.

Ketujuh, Bale Prabu Nilakendra, menampilkan Purwakarta pada masa demokrasi liberal 1959-1967. Kedelapan, Bale Prabu Surawisesa menyajikan Purwakarta pada masa orde baru 1968-1998 hingga masa reformasi 1998-sekarang. Kesembilan, Bale Ki Pamanah Rasa, memberikan gambaran Digjaya Purwakarta Istimewa 2008-2018.

Diorama ini diakhiri dengan pemutaran film dokumenter tentang Purwakarta dan tatar Sunda masa lalu hingga saat ini di ruang mini thetare. Hampir seluruh menggunakan sumber arsip, baik yang dimiliki oleh KAD maupun dari khasanah ANRI. Diorama ini juga tidak hanya melulu berisi tentang informasi Purwakarta namun juga Seluruh Tatar Sunda dari praasastinya hingga kebudayaannya. Bahkan termasuk kebudayaan nusantara.

Antusias Warga

Belum genap 2 bulan, BPDP telah dikunjungi ribuan orang dari backpacker Jakarta, DPD RI, hingga MenPAN. Bahkan MENPAN berucap tidak menyangka kota sekecil Purwakarta tetapi mempunyai museum secanggih BPDP. Dari seluruh hall dan 13 multimedia, ada 3 multimedia yang sangat menarik perhatian pengunjung, yaitu e-book yang dapat membaca sendiri, foto instant langsung jadi bareng Pak Bupati, dan keliling Purwakarta dengan sepeda.

Saat ini beberapa daerah melakukan studi banding ke BPDP, seperti dari Kab Bandung, Kab Cirebon, Bapuspida Jabar, Malang hingga Gianyar. Di masa mendatang Kang Dedi masih mempunyai mimpi yaitu akan membuat Diorama Nusantara pada tahun 2016, bahkan ia masih memimpikan adakan hadirnya Diorama Dunia di Purwakarta. Semoga terwujud Kang. (agg)

Octavia Syafarwati :

MENGENAL ARSIP KARTOGRAFI LEBIH DEKAT

Pada sebuah lorong Diorama Sejarah menuju hall D, Bapak Randy seorang guru Sekolah Dasar Kartika Kelas 2 dengan muridnya yang berjumlah 15 orang berhenti dan meminta muridnya untuk mendengarkan penjelasan dari pemandu diorama bernama Kak Arti terkait dengan peta yang terpampang pada jalanan yang menurun.

Empat peta yang terpampang pada sisi kanan lorong menggambarkan transformasi peta wilayah Indonesia dan sekitarnya. “Kak, mengapa pada peta pertama, pulau-pulau Indonesia tidak seperti sekarang? Apakah pulau-pulau tersebut mengalami perubahan?” tanya salah satu siswi pada pemandu diorama. “Pada peta pertama dan kedua merupakan peta sketsa yang digambar ketika para pelaut mengarungi kepulauan

Indonesia dan sekitarnya.

Pada saat itu teknologi pemetaan masih sederhana. Nah, peta-peta yang adik lihat adalah peta-peta yang terdapat pada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)”, jawab Kak Arti yang sedang bertugas memandu sekolah tersebut. Kak Arti kemudian menyebutkan khazanah arsip peta yang terdapat di ANRI terdiri atas Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), Biro Pusat Statistik (BPS), Departement van Oorlog (DVO), Direktorat Topografi Angkatan Darat (Dittopad), dan Topografische Dienst.

Pada kesempatan pertama, seorang siswa bernama Gigih bertanya “Kak Arti, peta itu apa?”. “Peta adalah gambaran muka bumi di atas bidang datar yang menggunakan

skala. Peta merupakan salah satu dari data geospasial, dimana terdapat dua jenis peta, yaitu peta umum dan peta khusus”, jawab Kak Arti yang telah memandu diorama selama dua tahun. Kak arti juga menambahkan bahwa pada awalnya peta yang dibuat menggunakan teknologi yang sederhana yaitu dengan sketsa ketika para pelaut berlayar dengan bantuan rasi bintang sebagai titik acuan.

Seorang siswi bernama Gemintang menunjuk peta yang kedua dengan tangannya mungil sembari berjinjit dan bertanya “Kakak, jika peta itu adalah gambar muka bumi, kenapa ada gambar manusia di sisi kanan dan kiri peta?”. Tak lama kemudian, Kak Arti menjawab “gambar manusia pada sisi kanan dan kiri adalah gambar ciri fisik dari orang-orang yang pernah ditemui oleh pembuat peta.

CERITA KITA

Kak Arti lalu mengeluarkan buku saku dari amplop cokelat bertuliskan Arsip Nasional Republik Indonesia untuk dijadikan sebagai hadiah bagi para siswa/i yang bisa menjawab pertanyaan Kak Arti. Tak lama kemudian dengan suaranya yang cukup lantang, Bapak Randy berkata “Anak-anak sebentar lagi Kak Arti akan memberikan hadiah bagi yang bisa menjawab pertanyaan”.

Dengan anggukan kepala dari Bapak Randy, kemudian Kak Arti dengan suara lembutnya melontarkan pertanyaan “adik-adik, ilmu apa yang mempelajari peta?” Beberapa lama kemudian, seorang siswa dengan nametag bernama Johannes mengangkat tangan dan menjawab “Geografi, kak”, dengan senyuman ramah Kak Arti merespon “jawaban Adik Johannes, kurang tepat.

Meskipun demikian Kak Arti akan member hadiah buku saku sebagai apresiasi dari keberanian adik dalam menjawab pertanyaan kakak”. Kak Arti lalu melanjutkan pembahasan dari pertanyaan yang telah dilontarkan “Ilmu yang mempelajari peta disebut dengan Kartografi”.

Pada peta ketiga yang agak sulit untuk dilihat oleh siswa dan siswi dibawah bimbingan Bapak Randy, Kak Arti menjelaskan bahwa pada peta ini sudah menggunakan metode pemetaan yang lebih maju dibanding dua peta sebelumnya. Peta tersebut menggunakan Ilmu Geodesi dan survey lapangan sehingga peta yang dihasilkan lebih akurat daripada dua peta. Selain itu peta ini juga telah menampilkan posisi astronomis dari daerah yang dipetakan.



Pengunjung sedang memperhatikan arsip peta yang ditampilkan di salah satu Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa

Pada peta keempat, terpampang peta dengan kualitas gambar dan warna yang baik. “Adik-adik pada peta terakhir yang dilihat adalah peta dari khazanah Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional atau disingkat dengan Bakosurtanal yang kini telah berubah nama menjadi Badan Informasi Geospasial atau BIG”, penjelasan dari Kak Arti sambil mengarahkan tangannya kepada peta yang didominasi oleh warna biru dan hijau. Instansi BIG adalah instansi yang bertanggung jawab dalam mengelola dan menerbitkan peta.

Tak terasa lorong yang menurun telah dilalui, para siswa/i SD Kartika dan Bapak Randy tampak puas dengan penjelasan kak Arti. Diakhir pemaparan mengenai pengenalan peta, Kak Arti berpesan kepada siswa/i yang duduk di kelas 2 SD “Peta adalah salah satu bukti dari wilayah teritorial dari NKRI, diharapkan dengan pengetahuan tentang peta, dapat meningkatkan rasa cinta tanah air”.

ANRI RAIH PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2014



Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) menyerahkan penghargaan Peringkat ke-1 (satu) Keterbukaan Informasi Publik Kategori Lembaga Tahun 2014 kepada Deputy Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan Dini Saraswati

Jakarta, ARSIP - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) meraih Peringkat ke-1 (satu) Keterbukaan Informasi Publik Kategori Lembaga Tahun 2014 dalam Anugerah Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2014 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) kepada Deputy Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan Dini Saraswati mewakili Kepala ANRI, Jumat, 12 Desember

2014 di Istana Wakil Presiden, Jakarta.

Pemeringkatan keterbukaan informasi pada badan publik dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). dengan metode penilaian yang dilakukan dalam dua tahapan, pertama yaitu *Self Assessment Questioner* dan Verifikasi Website. Selanjutnya adalah Visitasi ke seluruh badan publik yang memiliki bobot yang cukup untuk masuk dalam

peringkat sepuluh terbaik berdasarkan penilaian tahap pertama. Maka terpilihlah ANRI sebagai Peringkat ke-1 (satu) Keterbukaan Informasi Publik Kategori Lembaga Tahun 2014 dengan nilai akhir 94.4

Dalam sambutannya, JK mengatakan salah satu keberhasilan demokrasi adalah transparansi. Karena dengan transparansi, maka masyarakat dapat mengetahui setiap kejadian dan peristiwa yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan dan parpol. Kalau transparan, maka dia cenderung bersih. Tambah JK. (Rick)

SEMAKIN MAMPU MENGELOLA ARSIP DENGAN BAIK, SEMAKIN MODERN ORGANISASI



Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Djarot Sulistio Wisnubroto secara simbolis menyerahkan arsip statis BATAN kepada Kepala ANRI Mustari Irawan di Kantor BATAN, Jl. Kuningan Barat, Mampang Prapatan Jakarta (24/12)

Jakarta, ARSIP - Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) serahkan arsip statisnya kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Arsip Statis BATAN diserahkan oleh Kepala BATAN Djarot Sulistio Wisnubroto kepada Kepala ANRI Mustari Irawan di Kantor BATAN, Jl. Kuningan Barat, Mampang Prapatan Jakarta (24/12).

Dalam sambutannya, Djarot mengajak kepada seluruh jajarannya untuk melaksanakan pengelolaan

kearsipan dengan baik. Marilah kita jadikan kebiasaan mengelola arsip itu menjadi *lifestyle* kita, menjadi pola budaya kita, ujarnya. Lebih lanjut Djarot menambahkan bahwa pengelolaan arsip yang baik menjadi indikator manajemen kinerja organisasi. Semakin kita mampu mengelola arsip, maka semakin modern organisasi kita tambahna.

Mustari pun mengapresiasi acara penyerahan arsip statis BATAN.

BATAN telah menyerahkan arsip statis nya untuk keempat kalinya, ini artinya ada perhatian yang sangat besar sekali dari pimpinan tertinggi Batan imbuhnya. Lebih lanjut Mustari menambahkan pentingnya dukungan dari pimpinan tertinggi di instansi dalam penyelenggaraan kearsipan. Tanpa dukungan dari pimpinan penyelenggaraan kearsipan tidak akan berjalan secara optimal. (sa)

MUSTARI IRAWAN DAN MARENS ENGELHARD TANDATANGANI SECOND ADENDUM EP ANRI-NAN



Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mustari Irawan dan Kepala Arsip Nasional Belanda (NAN), Marens Engelhard menandatangani *Second Adendum to the Executive Program (EP)*

Jakarta, ARSIP - Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mustari Irawan dan Kepala Arsip Nasional Belanda (NAN), Marens Engelhard menandatangani *Second Adendum to the Executive Program (EP)*. Penandatanganan *Second Adendum* dilaksanakan pada 27 Februari 2015 di Ruang Rapat Pimpinan Lantai 4 Gedung C ANRI, Jakarta. *Second Adendum* merupakan perubahan kedua *Executive Program* ANRI dan

NAN dalam rangka pelestarian arsip dan peningkatan pemahaman sumber daya manusia di bidang kearsipan.

Dalam *Second Adendum* ini, kedua belah pihak menyepakati kerjasama digitalisasi arsip "*Indices Algemene Secretarie*", digitalisasi arsip pilihan mengenai "*Residentie Archieven*", digitalisasi "*Indices BOW*" dan Pelatihan di Bidang Kearsipan. Penandatanganan *Second Adendum*

antara ANRI dan NAN ini merupakan tindak lanjut *Memorandum of Understanding (MoU)* kedua belah pihak yang ditandatangani pada 13 Maret 2013 di Jakarta dan di The Hague (29/03/2013) serta *Executive Program* yang ditandatangani pada 21 Agustus 2013. (sa)

SIAPKAN PRODI KEARSIPAN UNILA JALIN KERJA SAMA DENGAN ANRI

Jakarta, ARSIP - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Universitas Lampung (Unila) melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan (02/03). Penandatanganan dilaksanakan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Unila Dwi Haryono dan Sekretaris Utama ANRI Gina Masudah Husni disaksikan oleh Kepala ANRI Mustari Irawan. Acara penandatanganan diselenggarakan di Ruang Soemartini, Lantai 2, ANRI Jakarta.

Dwi Haryono mengutarakan harapannya terhadap acara penandatanganan PKS. “Mudah-mudahan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama ini, yang merupakan tindak lanjut dari MoU yang ditandatangani oleh Kepala ANRI dan Rektor Unila pada bulan November 2014, kita akan bisa mengelola arsip di Universitas Lampung dengan baikungkap Dwi. Dwi juga mengungkapkan bahwa Unila juga akan membuka Program Studi (Prodi) di bidang kearsipan. “Kami juga sedang menyiapkan bagaimana membuka Program Diploma III Kearsipan ujanya.

Kepala ANRI Mustari Irawan menyambut baik pembukaan Prodi Kearsipan dan siap membantu pendirian Prodi tersebut. “Kami akan membantu sepenuhnya terutama yang terkait dengan pendirian program studi



Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Universitas Lampung (Unila) melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan (02/03). Penandatanganan dilaksanakan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Unila Dwi Haryono (Kiri) dan Sekretaris Utama ANRI Gina Masudah Husni (Kanan) disaksikan oleh Kepala ANRI Mustari Irawan.

diploma III (kearsipan), disamping yang sifatnya teknis”, jelas Mustari dalam sambutan. Lebih lanjut, Mustari menambahkan bahwa ANRI juga siap membuka program magang bagi para pegawai Unila yang ingin menambah pengetahuan di bidang kearsipan.

Adapun ruang lingkup PKS meliputi: peningkatan kualitas pendidikan kearsipan, pengembangan dan pembinaan sistem kearsipan dinamis dan statis, pengembangan sumber daya manusia kearsipan, optimalisasi tugas dan fungsi lembaga kearsipan di Unila dan mewujudkan Unila sebagai simpul Sistem Informasi

Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).

Pada tahun 2014, Unila telah mendirikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kearsipan yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 16 angka (3). Pasal tersebut menyatakan bahwa arsip daerah provinsi wajib dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi, arsip daerah kabupaten/kota wajib dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, dan arsip perguruan tinggi wajib dibentuk oleh perguruan tinggi negeri. (sa)

MENTERI YUDDY APRESIASI ANRI SELENGGARAKAN PERTEMUAN DEWAN EKSEKUTIF ICA DAN SEMINAR INTERNASIONAL PRESERVASI DAN AKSES ARSIP



Rangkaian acara Pertemuan Dewan Eksekutif ICA dan Seminar Internasional Kearsipan dibuka oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi

Bali, ARSIP - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dipercaya sebagai tuan rumah pelaksanaan Pertemuan Dewan Eksekutif atau Executive Board Meeting Dewan Kearsipan Internasional atau *International Council on Archives (ICA)* pada 27 April s.d 1 Mei 2015 di Hotel Inna Grand Bali Beach, jalan Hang Tuah, Sanur, Bali. Pertemuan Dewan Eksekutif ICA diikuti pengurus ICA, *Chairs of Section* of ICA dan pimpinan cabang regional ICA yang terdiri dari 13 wilayah regional ICA di dunia, mencakup Amerika Latin (ALA), Arab (ARBICA), Karibia (CARBICA), Afrika Tengah (CENARBICA), Asia Timur (EASTICA), Afrika Timur dan Selatan (ESARBICA), Eurasia (EURASICA), Eropa (EURBICA), Amerika Utara

(NAANICA), Pasifik (PARBICA), Asia Tenggara (SARBICA), Asia Selatan dan Barat (SWARBICA), dan Afrika Barat (WARBICA) yang berjumlah 52 orang. Rangkaian Pertemuan Dewan Eksekutif ICA terdiri dari rapat *Section, Branch, Elected Officer, Programme Commission, dan Executive Board*. Tujuan penyelenggaraan Pertemuan Dewan Eksekutif ICA adalah untuk membahas program kerja ICA dalam mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Arsip Nasional di 199 negara yang menjadi anggotanya dan mempersiapkan Konferensi Tahunan (*Annual Conference*) ICA yang rencananya diselenggarakan bulan September 2015 di *Reykjavik, Islandia*.

Adapun dalam waktu yang sama ANRI juga menyelenggarakan Seminar Internasional Kearsipan tentang Preservasi dan Akses Arsip dalam rangka Meningkatkan Proses Demokrasi dan Kesejahteraan Rakyat di Era Global di Hotel Inna Grand Bali Beach, jalan Hang Tuah, Sanur, Bali pada 28 s.d 29 April 2015. Rangkaian acara Pertemuan Dewan Eksekutif ICA dan Seminar Internasional Kearsipan dibuka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi. Turut hadir pula Kepala Polisi Daerah Bali, Irjen Pol Ronny Sompie dan Asisten I Sekretaris Daerah Bali. ANRI pun bekerja sama dengan Badan Perpustakaan dan

LIPUTAN

Arsip Daerah Provinsi Bali serta Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar turut menyukseskan penyelenggaraan acara Pertemuan Dewan Eksekutif ICA dan penyelenggaraan Seminar Internasional Kearsipan ini.

Dalam sambutannya, Yuddy memberikan apresiasi kepada ANRI sebagai tuan rumah penyelenggara acara ini. Terselenggaranya kegiatan Pertemuan Dewan eksekutif dan Seminar Internasional juga dapat menjadi ajang untuk memecahkan permasalahan, solusi dan ide perubahan dalam pengelolaan kearsipan sehingga penyelenggaraan kearsipan dapat lebih baik, khususnya di Indonesia dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. “Undang-undang kearsipan saat ini menjadi modal kuat bagi komunitas kearsipan di Indonesia untuk merevolusi diri menjadi lebih baik. Oleh karenanya, kearsipan juga dituntut harus berbasis teknologi, informasi dan komunikasi sehingga arsip terfungsikan secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan rakyat,” papar Yuddy.

Peserta Seminar Internasional Kearsipan berjumlah 200 orang yang terdiri dari peserta Pertemuan Dewan Eksekutif ICA dan anggota Komunitas Kearsipan Nasional yang mencakup Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota, Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi, dan Akademisi. Seminar ini memiliki tujuan meningkatkan peran serta ANRI dan lembaga kearsipan di Indonesia untuk terlibat aktif dalam pembahasan isu terkait preservasi dan akses arsip di level internasional. Selain itu, dalam Seminar Internasional yang diikuti Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota, Lembaga Kearsipan



Kepala ANRI Mustari Irawan memberikan sambutan pada acara Pertemuan Dewan Eksekutif ICA dan Seminar Internasional Kearsipan

Perguruan Tinggi menjadi salah satu wujud peran serta ANRI dalam melaksanakan pembinaan kearsipan nasional dengan memfasilitasi untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan narasumber dari negara-negara maju. Dengan demikian para peserta diharapkan dapat membuka wawasan tentang tren penyelenggaraan kearsipan yang sedang berkembang saat ini untuk mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis di Indonesia.

Kesediaan ANRI menjadi tuan rumah Pertemuan Dewan Eksekutif ICA dan penyelenggaraan Seminar Internasional Kearsipan merupakan salah satu wujud partisipasi aktif ANRI sebagai anggota ICA. Adapun sejak bulan September 2014, Kepala ANRI, Mustari Irawan terpilih sebagai Ketua Asosiasi Lembaga Kearsipan Internasional Cabang Regional ICA di Asia Tenggara (SARBICA) periode 2014-2016 pada acara *General Conference* yang diselenggarakan di Vietnam.

Di sela-sela pembukaan rangkaian acara, ANRI juga melaksanakan penandatanganan Memorandum Saling Pengertian atau *Memorandum of Understanding* dengan Arsip Nasional Korea Selatan (*The National Archives of the Republic of Korea*) yang turut disaksikan Menteri Yuddy. Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini antara lain mencakup pertukaran ahli dan teknologi bagi pengembangan pengelolaan arsip, pertukaran kopi bahan-bahan kearsipan, pameran dan publikasi bersama mengenai bahan-bahan kesejarahan dan penyelenggaraan pelatihan, workshop, seminar bersama. Memorandum Saling Pengertian ini juga merupakan tindak lanjut atas MoU yang telah dilakukan antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dengan Kementerian Keamanan dan Administrasi Publik Republik Korea. (TK)

MENTERI PANRB SOSIALISASIKAN PERATURAN TENTANG ARSIPARIS DAN HIMBAU DAERAH BANGUN DIORAMA

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Kearsipan Nasional dan Sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis di Ruang Serba Guna Noerhadi Magetsari, Gedung C, Lantai 2, ANRI, jalan Ampera Raya nomor 7 Jakarta Selatan. Acara rakor dilaksanakan pada 31 Maret 2015 dan dibuka Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi. Rakor diikuti 400 orang peserta yang terdiri dari arsiparis, pengelola arsip, perwakilan unit kerja pembina jabatan fungsional arsiparis tingkat pusat dan daerah serta para pimpinan lembaga kearsipan provinsi dan kabupaten/kota. Tujuan pelaksanaan rakor adalah untuk menyelaraskan tentang penyelenggaraan kearsipan nasional dan daerah khususnya bidang pembinaan SDM kearsipan yang nantinya bermuara pada terselamatkan dan terlestariannya arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa. Dalam kesempatan ini disampaikan juga materi tentang Kebijakan Penyelenggaraan Kearsipan Nasional oleh Kepala ANRI, Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan SDM Kearsipan oleh Deputy Bidang Pembinaan Kearsipan serta Kebijakan Formasi dan Inpassing Jabatan Fungsional Arsiparis oleh pembicara dari Badan Kepegawaian Negara.

Pembinaan SDM kearsipan menjadi salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan kearsipan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Kompetensi SDM kearsipan khususnya arsiparis sangat spesifik, karena tidak hanya menjaga informasi namun harus mampu menyajikan informasi yang autentik, utuh, lengkap dan terpercaya sehingga



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi membuka acara Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Kearsipan Nasional dan Sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis di Ruang Serba Guna Noerhadi Magetsari, Gedung C, Lantai 2, ANRI.

dapat menampilkan akntabilas dan transparansi suatu penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Dengan demikian, keberadaan arsiparis amat mendukung terlaksananya program Nawa Cita, tepatnya pada program kedua yakni membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Arsiparis dituntut untuk profesional dan senantiasa mampu meningkatkan kompetensi yang dimiliki sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Arsiparis juga harus mampu menciptakan dan membangun informasi yang cerdas dan bertanggungjawab sebagaimana rincian pekerjaan kearsipan yang tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis.

Selain itu, dari pekerjaan yang dilakukan oleh para arsiparis di Indonesia diharapkan mampu

melestarikan arsip bernilai guna sejarah (statis) yang mencerminkan keanekaragaman daerah dan pada akhirnya mewujudkan arsip sebagai warisan budaya bangsa. Arsip yang dilestarikan tersebut dapat didayagunakan dengan baik dan benar terutama untuk ilmu pengetahuan dan rekam jejak perjalanan bangsa, salah satunya dengan membangun Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa/Daerah di tiap provinsi, kabupaten/kota. Khazanah arsip yang dilestarikan di ANRI ataupun lembaga kearsipan provinsi/kabupaten/kota dapat dimanfaatkan sumber utama substansi materi dalam pembuatan Diorama.

Pembangunan Diorama ini selain dapat memvisualisasikan memori kolektif bangsa/daerah juga dapat memperkokoh pembangunan karakter bangsa dan berimplikasi langsung kepada masyarakat karena dapat menambah pengetahuan dan informasi dari berbagai muatan materi yang tersaji di Diorama.

AKREDITASI KEARSIPAN

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin tercipta dan ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Untuk menilai kelayakan dan mutu penyelenggaraan kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melaksanakan akreditasi kearsipan.



Sehubungan dengan hal tersebut, ANRI memberikan kesempatan bagi Unit Kearsipan Lembaga Negara/BUMN/BUMD, Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi, Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan dan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan untuk mengikuti proses akreditasi kearsipan. Adapun syarat dan ketentuan peserta akreditasi kearsipan adalah sebagai berikut :

1. Syarat Administrasi

- a. berbadan hukum; dan
- b. telah terdaftar pada sistem pengawasan kearsipan yang dikelola ANRI

2. Syarat Teknis

- a. Unit Kearsipan meliputi:
 - 1) telah menyusun pedoman Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan pengelolaan arsip inaktif; dan
 - 2) telah melakukan penataan arsip inaktif dalam bentuk Daftar Arsip Inaktif.

b. Lembaga Kearsipan meliputi:

- 1) telah menyusun pedoman Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan pengelolaan arsip statis; dan
- 2) telah melakukan pengelolaan arsip statis dalam bentuk finding aids (sarana penemuan kembali arsip statis).

c. Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan meliputi:

- 1) memiliki pedoman penyelenggaraan jasa kearsipan; dan
- 2) telah melakukan minimal 3 (tiga) kali kegiatan penyelenggaraan jasa kearsipan sesuai dengan bidang yang akan diakreditasi.

d. Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan meliputi:

- 1) memiliki pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan; dan
- 2) telah melakukan minimal 3 (tiga) kali kegiatan pendidikan dan pelatihan kearsipan sesuai dengan bidang yang akan diakreditasi.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pusat Akreditasi Kearsipan melalui telpon 021-7805851 ext. 723 atau 081282484928 atau Sdri. Karuniatun Tigawati Hp. 081310649327, atau Sdri. Endang Kristiani Hp. 08128740776. Email : pusatakreditasi@gmail.com





KUNJUNGI...
GEDUNG ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DI JALAN GAJAH MADA NO. 111, JAKARTA BARAT

- PAMERAN KELEMBAGAAN ARSIP NASIONAL RI
- PAMERAN ARSIP
- PEMUTARAN ARSIP FILM SEJARAH PERJUANGAN INDONESIA
- PAMERAN BENDA-BENDA BERSEJARAH

Jadwal Berkunjung:
Pameran Arsip, Kelembagaan, & Pemutaran Arsip Film
Dibuka Senin-Jum'at, 9.00-15.00 WIB



UNDUH MAJALAH ARSIP DALAM FORMAT DIGITAL



Cara unduh majalah ARSIP dalam format digital:

1. Masuk ke *website* www.anri.go.id
2. Klik menu "Publikasi"
3. Kemudian pilih "Majalah ARSIP"
4. Unduh *file* "Majalah ARSIP"
5. Majalah ARSIP tersedia dalam *Portable Document Format* (PDF) dan dapat dibaca menggunakan *software* Adobe Acrobat